

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kelanjutan dan juga evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai dengan akhir Desember 2024 anggaran tersebut terserap sebesar Rp 39.102.964.370 Atau sebesar 95,01% dari total anggaran Rp. 41.157.502.185 tahun 2024. Sedangkan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar 100%.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, 10 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROV. KALSEL**



Drs. H. Zakly Asswan, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650909 198602 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok.....	5
C. Struktur Organisasi.....	11
D. Isu Strategis SKPD.....	12
E. Sistematika Penyajian.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
1. Sasaran RPJMD.....	40
2. Eselon II.....	42
3. Esselon III.....	56
1). Sekretaris.....	56
1.1). Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.....	65
1.2). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	68
1.3). Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan.....	71
2). Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.....	72
3.1). Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan.....	76
3.2). Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.....	79
3). Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam	
Kebakaran.....	83
3.1). Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat.....	88
3.2). Kepala Seksi Pemadam Kebakaran.....	93
4). Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.....	96

4.1).	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil.....	101
4.2).	Kepala Seksi Bina Kesamaptaaan.....	106
5).	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	109
5.1).	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian.....	111
5.2).	Kepala Seksi Kerjasama.....	114
B.	Akuntabilitas Keuangan	
1.	Anggaran dan Realisasi APBD 2024.....	118
2.	Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	121
3.	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	128
BAB IV	PENUTUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Penyusunan laporan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disusun sebagai upaya memberikan informasi atas efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang tersusun dalam DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai target/sasaran strategis. Tujuan yang ingin dicapai disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 antara lain adalah :

- a. Memenuhi kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Bahan evaluasi pencapaian visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pergub 027 Tahun 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

1. Uraian Tugas tersebut adalah :
 - a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;

- f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - g. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personel;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, keadaan sumber daya pendukung berjumlah 94 (lima puluh dua) orang yang terdiri 52 orang PNS dan 42 orang PPPK dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Data Pejabat Struktural / Fungsional
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan
Keadaan per 31 Desember 2024

NO.	JABATAN	Eselon	Gol.	Pend. Formal	Jenis Kelamin
1	Kepala Satpol PP & Damkar	II.a	IV/d	S2	L
2	Sekretaris	III.a	IV/b	S1/D4	L
3	Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah	III.a	IV/a	S2	L
4	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	III.a	IV/b	S1/D4	L
5	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas	III.a	IV/b	S2	L
6	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	III.a	IV/b	S1/D4	L
7	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	IV.a	III/d	S1	P
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	III/d	S1	L
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IV.a	III/d	S2	L
10	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	IV.a	IV/a	S2	L
11	Kepala Seksi Penyelidikan & Penyidikan	IV.a	III/c	S1	L
12	Kepala Seksi Bina Satuan Linmas	IV.a	III/c	S1/D4	L
13	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	IV.a	III/c	S2	L
14	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil	IV.a	III/b	S1	L
15	Kepala Seksi Bina Kesamaptan	IV.a	III/d	S1	L
15	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	IV.a	III/c	S1	L
16	Kepala Seksi Kerjasama	IV.a	III/c	S2	P

**Data Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin PNS & PPPK
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Kalimantan Selatan
Keadaan per 31 Desember 2024**

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember 2024 berjumlah 94 orang dengan jumlah laki-laki 52?, orang dan jumlah perempuan 5 orang.

1. Kualifikasi Pendidikan PNS :

- a. Pendidikan S2 : 7 Orang
berjumlah
- b. Pendidikan S1/D4 : 21 Orang
berjumlah
- c. Pendidikan D3 : 2 Orang
berjumlah
- d. Pendidikan SLTA : 21 Orang
berjumlah
- e. Pendidikan SLTP : 1 Orang
berjumlah

Tabel 1.2.

Kualifikasi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	1	7
2	S1/D4	17	4	21
3	D3	2	0	2
4	SLTA	21	0	21
5	SLTP	1	0	1
6	SD	0	0	0
	Jumlah	47	5	52

2. Pangkat/golongan/ruang :

- a. Pangkat/Golongan Juru Tk I (I/d) berjumlah 1 orang
- b. Pangkat/Golongan Pengatur (II/c) berjumlah 1 orang
- c. Pangkat/Golongan Pengatur Tk I (II/d) berjumlah 6 orang
- d. Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) berjumlah 10 orang
- e. Pangkat/Golongan Penata Muda Tk I (III/b) berjumlah 14 orang
- f. Pangkat/Golongan Penata (III/c) berjumlah 6 orang
- g. Pangkat/Golongan Penata Tk I (III/d) berjumlah 7 orang
- h. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) berjumlah 2 orang
- i. Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b) berjumlah 4 orang
- j. Pangkat/Gol. Pembina Madya Muda (IV/d) berjumlah 1 orang

Tabel 1.3.
Pangkat/Golongan/Ruang

No	Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Tk I (I/d)	1	0	1
2	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
3	Pengatur (II/c)	1	0	1
4	Pengatur Tk I (II/d)	6	0	6
5	Penata Muda (III/a)	10	0	10
6	Penata Muda Tk I (III/b)	13	1	14
7	Penata (III/c)	5	1	6
8	Penata Tk I (III/d)	4	3	7
9	Pembina (IV/a)	2	0	2
10	Pembina Tk I (IV/b)	4	0	4

No	Pangkat/Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
	Jumlah	47	5	52

3. Jumlah Pejabat Struktural / fungsional :

- Kepala Dinas (eselon II.a)	: 1 Orang
- Sekretaris (eselon III.a)	: 1 Orang
- Kepala Bidang (eselon III.a)	: 4 Orang
- Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	: 11 Orang
- Fungsional Pol PP	: 14 Orang
- PPPK Damkar	: 42 Orang
- Unsur Staf	: 21 Orang

Tabel 1.4.
Pejabat Struktural/Fungsional

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	0	1
2	Eselon III a	5	0	5
3	Eselon IV a	9	2	11
4	Fungsional Pol PP	14	0	14
5	Fungsional Damkar	38	4	42
	Jumlah	67	6	73

2. Kualifikasi Pendidikan PPPK :

a.	Pendidikan S2 berjumlah	: 0
b.	Pendidikan S1/D4 berjumlah	: 5

c	Pendidikan D3 berjumlah	: 0
d	Pendidikan SLTA berjumlah	: 37
e	Pendidikan SLTP berjumlah	: 0

Tabel 1.2.

Kualifikasi Pendidikan PPPK

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	0	0	0
2	S1/D4	3	2	5
3	D3	0	0	0
4	SLTA	37	0	37
5	SLTP	0	0	0
6	SD	0	0	0
	Jumlah	40	2	42

C. Struktur Organisasi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2023 tentang, Tugas, Fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran , uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Sekretariat; terdiri dari :

- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas; terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Personel; dan
 - Seksi Bina Kesamaptaan.
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - Seksi Kerja Sama
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - Seksi Bina Satuan Linmas; dan
 - Seksi Pemadam Kebakaran
- g. Sedangkan Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari:
 - Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian
 - Setiap jabatan fungsional dimaksud dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Isu Strategis SKPD

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban

tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

Berdasarkan beberapa permasalahan/kendala dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menentukan isu strategis berdasarkan Hasil Evaluasi Renstra Pada Tahun 2024, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Warga Negara Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Faktor Internal

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatanyang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan(Strenght)

1. Adanya Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranyang jelas, hal ini di maksudkan agar seluruh jajaran personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada tupoksi dan kewenangan yang di amanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
2. Adanya Personil/SDM Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Personil/SDM mutlak sangat di perlukan karena sebagai pelaksana fungsi menajemen dan operasional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan tugas, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, baik sarana prasarana dan fasilitas perkantoran maupun sarana dan prasarana serta fasilitas operasional lapangan.
4. Tersedianya anggaran/dana operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Ketersediaan dana operasional mutlak di perlukan, karena tanpa ada dukungan dana akan sulit mencapai tujuan yang hendak di capai dalam sebuah organisasi.
5. Adanya uraian tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Uraian tugas merupakan pedoman bagi unsur pelaksana tugas agar dalam pelaksanaannya jelas dan tidak menjadi tumpang tindih, dalam arti siapa harus berbuat apa, di mana dan bagaimana, dan mengapa harus di kerjakan itu jelas.

b. Kelemahan(Weakness)

1. Jumlah personil kurang, jumlah personil dirasakan sangat kurang apabila di banding dengan tuntutan tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan berpengaruh

pada tingkat pencapaian kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini hanya memiliki personil sebanyak 52 orang, dari jumlah tersebut petugas operasional lapangan 30 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, seharusnya memiliki personil minimal sebanyak 350 orang.

2. Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen dan penempatan personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada saat ini belum sesuai dengan ketentuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengemban tugas spesifik dan memiliki karakter yang berbeda dengan ASN pada umumnya. Oleh karena itu kedepan di perlukan tambahan personil dengan formasi khusus serta sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus (seleksi uji kompetensi dan tes psikologi).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah, berdasarkan dari evaluasi personil yang di tempatkan pada Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan motivasi kinerja masih rendah, dikarenakan kemampuan pada bidang tugas, inisiatif dan responsive yang kurang.
4. Diklat keterampilan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih kurang, tuntutan tugas yang mengandung resiko cukup besar, personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus di bekali kemampuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, diklat teknis, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sarana dan prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih belum memenuhi standart keperluan, sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.

6. Gedung perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini belum memiliki gedung perkantoran sendiri, dimana masih menggunakan ruang gedung perkantoran dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Faktor Eksternal

1. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan Instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun peluang ancaman yang diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dan berdasarkan evaluasi di lapangan masih ditemukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu dilakukan penegakannya.
2. Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai tugas

pokok, fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksanaan tugas juga telah di atur di dalam Permendagri, termasuk pakaian dinas serta perlengkapan dan peralatan kerja. Hal ini merupakan peluang untuk Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.

3. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Dukungan DPRD untuk dukungan legislasinya dan alokasi anggaran operasional.
4. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Tanpa adanya dukungan positif dari masyarakat, maka keberhasilan pelaksanaan tugas akan kurang optimal serta membawa dampak yang kurang baik.
5. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang perlu dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur merupakan obyek yang harus dilaksanakan penegakannya oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
6. Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait. Dengan adanya dukungan program dan kegiatan maka kinerja SKPD akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari dua faktor yakni internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dibuat sebuah matrik SWOT, matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 6: Matrik SWOT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Internal Eksternal	Strengths (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	Strategi(SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi(WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treaths (T)	Strategi(ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi(WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Matriks SWOT ini menjadi dasar analisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang dibagi dalam empat strategi berdasarkan kombinasi kekuatan–peluang, kekuatan–ancaman, kelemahan–peluang dan kelemahan–ancaman yakni:

1. Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan kekuatan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil optimal, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 7: Strategi Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunity) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kekuatan (Strenght)		Peluang (Opportunities)
1	2	3	4
1.	Adanya visi dan Misi Daerah yang selaras dengan TUPOKSI OPD	1.	Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satpol.PP dan Damkar
2.	Adanyatugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas	2.	Adanya Perda Prov.Kalsel tentang pembentukan organisasi dan tatakerja

			Satpol.PP dan Damkar Prov.Kalsel
3.	Adanya uraian tugas Satpol.PP dan Damkar yang jelas	3.	Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas
4.	Adanya personil/SDM	4.	Adanya Perda dan Pergub yang perlu di dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya
5.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas	5.	Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait

2. Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memaksimalkan kekuatan yang ada untuk meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 8: Strategi Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kekuatan (Strenght)		Ancaman (Threats)
1	2	3	4
1.	Adanya visi dan Misi Daerah yang selaras dengan TUPOKSI OPD	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Adanya tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Adanya uraian tugas Satpol.PP dan Damkar yang jelas	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Adanya personil/SDM	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Tersedianya sarana dan	5.	Koordinasi dan kerjasama

	prasarana penunjang operasional masih terbatas		dengan Instansi terkait
		6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

3. Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan yang ada, digambarkan dengan tabel berikut:

Tabel 9: Strategi Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kelemahan (Weakness)		Peluang (Opportunity)
1	2	3	4
1.	Jumlah personil kurang	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Kantor belum punya sendiri	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas.	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas rendah	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
6.	Diklat peningkatan kapasitas Satpol.PP dan Damkar masih belum terpenuhi	6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

4. Strategi Kelemahan (Weakness) - Ancaman (Threats)

Pada strategi ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan perlu meminimalisir kelemahan dan

menghindari ancaman sehingga pelaksanaan program berjalan lancar, digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 10: Strategi Kelemahan (Weakness)– Ancaman (Threats) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

No	Internal	No	Eksternal
	Kelemahan (Weakness)		Ancaman (Threats)
1	2	3	4
1.	Jumlah personil kurang	1.	Pelanggaran Perda dan Pergub
2.	Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan	2.	Gangguan Tramtibum
3.	Kantor belum punya sendiri	3.	Kemampuan/kapasitas SDM
4.	Sarana dan prasarana fasilitas penunjang kerja masih terbatas.	4.	Ketaatan dan kepedulian masyarakat
5.	Diklat peningkatan kapasitas Satpol.PP dan Damkar masih perlu ditingkatkan	5.	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
		6.	Arus globalisasi dan otonomi daerah

Sistematika Penyajian

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024, dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.
- Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2024.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Era Reformasi dan globalisasi sekarang ini membawa dampak yang cukup berat pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, dari tingkat pusat sampai daerah, yang bermuara pada tuntutan masyarakat banyak antara lain penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat secara transparan, baik bersih dan bebas dari KKN yang diwujudkan dengan akuntabilitas publik sebagai implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur/menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan PP nomor 108 tahun 2000 diatas adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi Pemerintah. Dalam PP Nomor 108 tahun 2000 pasal 1 ayat (4) disebutkan Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis menjadi landasan dan pedoman bagi organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan Rencana Strategis pemerintah dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja SKPD yang memuat APBD. PP No 105 Tahun 2000/Permendagri 13 Tahun 2006 mengatur daerah menyusun anggarannya dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dan perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Komponen pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi bidang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004.

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah, karena tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dengan pendekatan kinerja, anggaran disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran, standar pelayanan, dan standar biaya. Setiap unit harus bisa merencanakan anggarannya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai indikator yang jelas dan terukur, sehingga setiap jenjang dalam unit kerja akan mempunyai tanggung jawab yang jelas. Anggaran kinerja menghubungkan secara jelas kegiatan dengan input, output, dan hasil yang diharapkan. Melalui proses anggaran kinerja, pemerintah daerah menetapkan output dan hasil dari tiap program dan aktivitas pelayanan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam milenium ketiga ini.

Perencanaan strategis ini memberikan gambaran kedepan tentang bagaimana suatu lembaga dapat berjalan dengan baik menuju tujuan, sesuai visi dan misinya dengan memanfaatkan kembali internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal, dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada.

Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu Instansi Pemerintah, maka disusunlah Renstra ini yang sekaligus dapat dijadikan sebagai pemandu arah dan pedoman serta langkah dan arah dalam melakukan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

Maksud disusunnya Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek, maupun jangka menengah, dengan mengarahkan seluruh dimensi dan potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan

Selatan, dengan mengintegrasikan seluruh kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara spesifik tujuan penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Mewujudkan komitmen terhadap program yang disepakati dari kegiatan yang telah dibahas secara partisipatif dengan stakeholders (pihak-pihak terkait).
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, kronologis dan berkelanjutan secara sinergis.

Adapun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan disusun berdasarkan:

- a) Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021-2026
- b) RPJMD tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan
- c) Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

Renstra ini juga disusun sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dan sekaligus sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan organisasi.

1. VISI DAN MISI

VISI

KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA

MISI

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari penjabaran visi dan misi Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Tujuan

- a. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
- b. Menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Perlindungan masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai langkah untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum
- b. Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan penyelidikan
- c. Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum
- e. Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel

- g. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan non kebakaran.
- h. Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan non kebakaran.

3. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mencoba menempuh berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
- 2) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Pelaksanaannya serta implementasi di Lapangan
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan
- 4) Meningkatkan koordinasi kerja dengan kab/kota serta instansi terkait maupun dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum.

A. Rencana Kerja Tahun 2024

Program Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang bersumber dari dana Belanja Langsung APBD Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan serta 35 (tiga puluh lima sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Program rutin SKPD terdiri dari 1 Program, 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program prioritas pembangunan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 2 Program, 4 Kegiatan dan 17 SubKegiatan antara lain:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

- b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
 - c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - d) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - e) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - f) Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - g) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - h) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - d) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
 - b) Pembentukan Sekretariat PPNS
 - c) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - a) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - b) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

1. Eselon II

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	Baik
2.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin
		Inovasi Layanan Publik yang dibuat dan diterapkan	1 Inovasi

No.	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 13.701.632.500
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 20.703.082.885
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Rp. 6.752.786.800

	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Jumlah	Rp. 41.157.502.185

2. Eselon III

a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan dan pelaporan kinerja	Persentase Pemenuhan dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%
2	Pemenuhan Sarpras & Administrasi Perkantoran pada Satpol PP & Damkar	Persentase sarpras dan Administrasi yang terlayani	100%
3	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Pada Satpol PP & Damkar	Persentase pegawai yang terpenuhi secara Adminstrasi Kepegawaian	100%
4	Meningkatkan Kualitas Serapan anggaran pada satpol pp damkar	Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Rp. 22.234.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 11.436.955.500
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 722.914.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 770.612.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 270.150.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 322.274.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 322.274.000
	Jumlah	Rp. 13.545.252.500

a.1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	58 Orang/Bulan

	Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN	
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.273.755.500
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 163.200.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 56.202.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.880.000
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 224.050.000
Jumlah		Rp. 11.537.442.500

a.2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Pelayanan Surat Menyurat	360 Dok
2	Melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang dilayani Secara tertib	50 Dokumen
3	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM	5 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 9.500.000
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 635.332.000
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 361.622.000
4	Pengadaan Mebel	Rp. 68.340.000
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 340.650.000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 287.894.000
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 34.380.000
Jumlah		Rp 1.737.718.000

a.3. Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.030.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 7.316.500
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 46.100.000
	Jumlah	Rp. 68.447.000

b. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum	Persentase Masyarakat dan Aparatur Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur	100%
2	Meningkatkan Peran petugas penegak produk hukum dalam penyelidikan dan penyidikan	Persentase aparatur yang memahami tentang peraturan trantibum	100%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 60.000.000	
2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 124.999.900	
3	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 300.000.000	
4	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 331.568.000	
5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 15.000.030	
6	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp. 80.000.000	
Jumlah		Rp. 911.568.200	

b.1 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan
No.	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Rp. 124.999.900
Jumlah			Rp. 124.999.900

b.2 Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Dokumen
2	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan
3	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen
4	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan
5	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan
No.	Sub Kegiatan		Anggaran
1	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Rp. 60.000.000
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan		Rp. 300.000.000

	Daerah dan Peraturan Gubernur	
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 331.568.000
4	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 15.000.300
5	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Rp. 80.000.000
Jumlah		Rp. 786.568.300

c. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana	Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil	100%
2	Meningkat Peran Satlinmas dan Damkar	Persentase Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Aktif Dalam Penanganan Ketertiban umum, Bahaya Kebakaran dan Bencana	100%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp. 1.000.000.000
2	Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Rp. 648.470.000
3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rp. 3.049.036.800
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Rp. 3.055.280.000
Jumlah			Rp. 7.752.786.800

c.1 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen

	Ketertiban Umum	
No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	a. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.000.000.000
Jumlah		Rp. 1.000.000.000

c.2 Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	73 Unit
No.	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Rp. 648.470.000	
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan kabupaten/Kota	Rp. 3.049.036.800	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 3.055.280.000	
Jumlah		Rp. 6.752.786.800	

d. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Pemenuhan Sumberdaya Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persentase aparatur Pol. PP, Linmas dan Damkar yang bersertifikat	100%
2	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Prov Kal Sel	Persentase anggota Satpol PP dan Damkar yang meningkat klasifikasi	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 156.380.000
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 1.008.183.585
3	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp. 110.000.000
Jumlah		Rp. 1.274.563.585

d.1 Kepala Seksi Bina Kesamaptaaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan
No.	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp.	110.000.000
Jumlah		Rp.	110.000.000

d.2 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	135 Orang
No.	Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	156.380.000
2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp.	1.008.183.400
Jumlah		Rp.	1.164.563.400

e. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketertiban Umum yang Berhasil Ditindak Lanjuti	100%
2	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum	Persentase Masyarakat/Aparatur yang Memahami Tentang Peraturan Ketertiban Umum	100%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp.	361.388.100
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rp.	983.835.000
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Rp.	149.999.900
4	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Rp.	16.056.049.700
5	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp.	122.945.700
Jumlah		Rp.	17.673.331.100

e.1 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan
2	Terlaksananya Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan	3 Laporan

	atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	30 Unit
No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan	Rp.	16.056.049.700
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp.	122.945.700
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	983.835.000
Jumlah		Rp.	17.162.830.400

e.2 Kepala Seksi Kerjasama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	13 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13 Dokumen
No.	Kegiatan	Anggaran	
1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	361.388.100
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	149.999.900

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Untuk mengukur kinerja organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% s.d. 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% s.d. 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% s.d. 70%	Baik
V	Diatas 50% s.d. 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

1. Sasaran Indikator Tujuan SKPD

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	98.83%(3135 Yang terlayani)	98.83%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan	62%	100%(188 kejadian)	100%

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		non kebakaran			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Point	90.41	100
		Inovasi Layanan publik yang dibuat dan diterapkan	1 Inovasi	1	100
Rata-rata Capaian					99.71%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	79,83%	91.07%	96.66%	100%	98.83% (3135 Yang terlayani)	98.83
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	35% (43 Kejadian)	100% (153 Kejadian)	100% (149 Kejadian)	62%	100% (188 kejadian)	100
3	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD	-	100%	100%	-	-	-
4	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	90 point	90.41	100
	Inovasi Layanan publik yang dibuat dan diterapkan	-	-	-	1 inovasi	1 Inovasi	100
	Rata-rata Capaian						Sangat Memuaskan

2. Capaian Kinerja Eselon II

Unsur yang berperan dan menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama membantu Gubernur/Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, ditetapkan 3 Indikator kinerja utama Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah
- b. Meningkatnya kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Perbandingan realisasi dengan target terlihat berdasarkan table berikut :

Berdasarkan Renstra 2021 s/d 2026

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target RPJMD 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target RPJMD 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	100	100	100	96,66	100	98.83
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	60	100	61	100	62	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan					90	100

- a. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah
- Dalam Mencapai Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah, berbagai upaya telah dilakukan, terutama melalui peningkatan efektivitas dan intensitas penyuluhan Produk Hukum Daerah melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Bidang pada SATPOL PP & DAMKAR, serta Upaya meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SATPOL PP & DAMKAR.

Atas hasil kinerja dan upaya tersebut, terlihat pada Tabel diatas bahwa capaian Kinerja Organisasi SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel selalu terpenuhi dari tahun ke tahun. Kenaikan angka realisasi/cakupan masyarakat yang terlayani atas gangguan TRANTIBUMLINMAS mengalami kenaikan dikarenakan jumlah angka kejadian/aduan gangguan trantibumlinmas kenaikan atau terlayani dalam upaya terhadap sesuai tugas fungsi Satpol PP dalam hal menegakkan aturan aturan produk Hukum Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam Mencapai Realisasi Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran telah melakukan kinerjanya dengan baik. Adapun upaya prioritas yang dilakukan adalah pembinaan melalui bimtek/sosialisasi terhadap Aparatur SATLINMAS se- Kalsel, dan Satpol PP & Pemadam kebakaran tenaga pendukung penanganan KARHUTLA dan penyelamatan, dengan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mitigasi dan penanganan bencana serta relawan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikoordinir oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif dilakukan, dengan mensosialisasikan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum dari Pemerintah Pusat mengenai Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dengan

meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta ancaman sanksi pidana atas pembakaran hutan dan lahan, diharapkan angka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat menurun dari tahun ke tahun.

Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran merupakan salah satu faktor yang dapat menekan angka kebakaran hutan lahan dan permukiman, factor alam (musim kemarau) kadangkala tidak dapat diantisipasi, sehingga pada musim kemarau kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diprediksi dan diantisipasi secara maksimal.

Pada tahun 2024 Satpol PP&Damkar Provnsi Kalimantan Selatan meinventasir angka kejadian Kebakaran dan penyelamatan yang ditangani, hal ini dikarenakan selama tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan intensitas iklim/cuaca didominasi cuaca/iklim hujan, sehingga bencana KARHUTLA relatif kecil ,yang agak rawan adalah daerah pemukiman penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2024), hal ini terlihat dari table berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		Tahun 2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	120 Kejadian	120 Kejadian	61%	100%(149 Kejadian)	62%	100%(184 Kejadian)

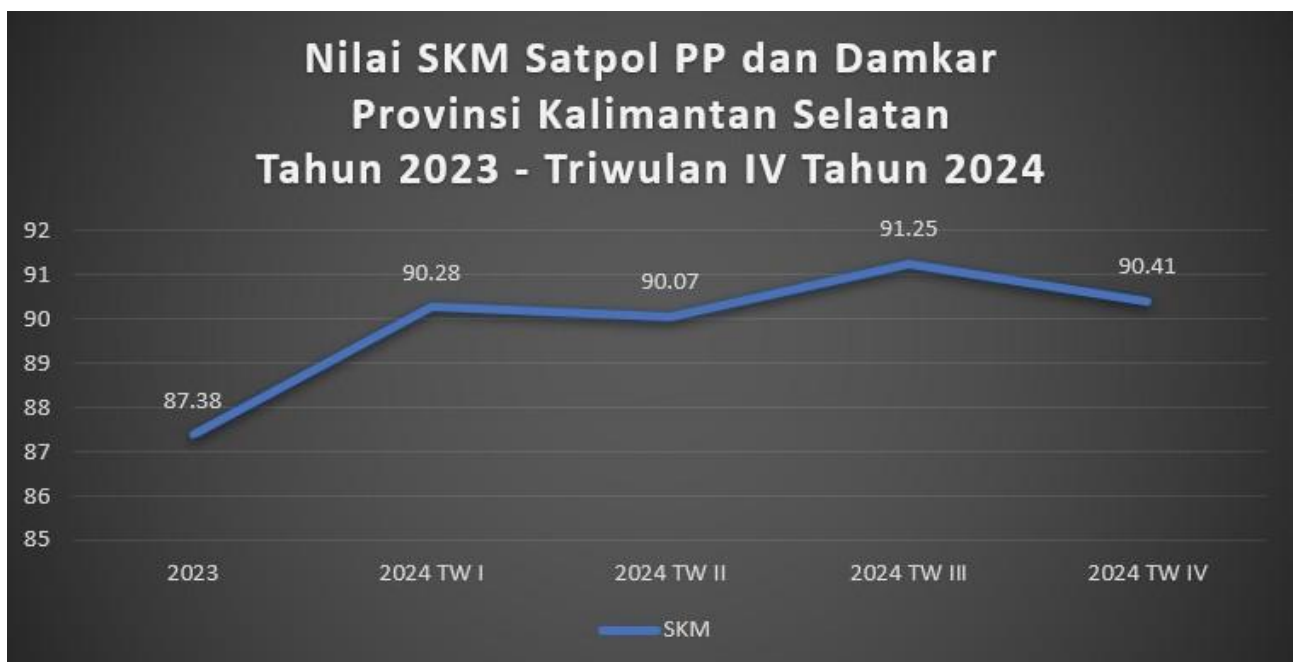
Penambahan Penanganan kejadian pada target tahun 2024 tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan serta kondisi cuaca di tahun 2024 yang tidak menentu (Pancaroba), dan agak rawan di pemukiman penduduk dari jumlah persentase jumlah kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Dalam Mencapai Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan, berbagai upaya telah dilakukan, terutama melalui peningkatan Sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang dalam menunjang

terhadap pelayanan. Peningkatan kapasitas SDM melalui ikut serta bimtek/sosialisasi dalam hal pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, ditunjang dengan juga sarana prasarana mobilitas didalam maupun diluar kantor untuk memberikan pelayanan terhadap Masyarakat. Memberi pengetahuan terhadap keberadaan OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan melalui media/website/email yang resmi dikelola oleh OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan. Didalam media tersebut memberikan gambaran aktivitas/kegiatan maupun berita yang telah dilaksanakan yang sekiranya menjadi pengetahuan kepada Masyarakat, pelayanan, informasi, atau aduan. Yang sekiranya bisa memberikan feedback kepada OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tugas dan fungsinya.

SKM SATPOL PP DAMKAR PROV. KALSEL



2. Perbandingan Realisasi dengan Target Terkait

Dalam mencapai realisasi dan target organisasi perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak lepas dari sinkronisasi tugas, peran, fungsi dan koordinasi seluruh Bidang pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel. Dengan meningkatnya Peran Sekretariat, Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Personil, serta Sinkronisasi antara

Bidang Teknis Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, capaian kinerja SATPOL PP & DAMKAR terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja SATPOL PP dan DAMKAR pada tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	91.07%	96,66%	100%	98.83	98.83%
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100% (153 Kejadian)	100% (149 Kejadian)	62%	100	100%
3	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	90 Point	90.41 Point	100%
	Inovasi Layanan publik yang dibuat dan diterapkan			1 inovasi	1 Inovasi	100%

Capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menunjang terlaksana dan terselenggaranya misi Kepala Daerah **Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik;**

Capaian atas hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 juga merupakan salah satu SPM Penyelenggaraan urusan Wajib TRANTIBUMLINMAS Provinsi yang dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui indicator pencapaian SPM Sebagai berikut :

**TABEL PENGHITUNGAN
SPM URUSAN TRANTIBUM LINMAS PADA SATPOL PP & DAMKAR**

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
IP Mutu SOP	=	$\frac{10}{10}$	Dokumen Dokumen	= 100%
IP Mutu SDM	=	$\frac{267}{267}$	Orang Orang	= 100%
IP Mutu Sarpras	=	$\frac{65}{100}$	Unit Unit	= 65%
IP Pelayanan Dampak	=	$\frac{1}{1}$	Dokumen Dokumen	= 100%

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR				
IP Penerima Layanan Dasar	=	$\frac{3135}{3135}$	Orang Orang	= 100%

PROV.KALSEL TAHUN 2024

PERHITUNGAN IP SPM MUTU LAYANAN DASAR & PENERIMA LAYANAN DASAR				
BOBOT				
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar	=	$\frac{100\% + 100\% + 65\% + 100\%}{4}$	= 94,17%	x 20% = 18,83%
Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar	=	$\frac{100\%}{1}$	= 100%	x 80% = 80,00%

INDEKS PENCAPAIAN SPM (IP SPM)	=	18,83%	+	80,00%	= 98,83%
---------------------------------------	---	--------	---	--------	-----------------

Kenaikan angka capaian realisasi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi jika

dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu (lihat lampiran) dikarenakan oleh meningkatnya kuantitas jumlah PPNS Penegak PERDA pada SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. (Jumlah PPNS Penegak Perda Tahun 2023 sebanyak 59 orang, dan pada Tahun 2024 sebanyak 67 orang). Yang ideal seharusnya Kepala Daerah kab/kota mempersiapkan tenaga PPNS minimal 7 orang (dan atau 1 PPNS per kecamatan+2 Sekretariat) untuk mencapai target yang diarahkan Kemendagri Pusat. Dengan keterbatasan tenaga PPNS Penegak PERDA, yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan atas gangguan TRANTIBUMLINMAS serta penegakan PERDA PERKADA, hal ini yang mengakibatkan proses tindak lanjut atas aduan gangguan/penindakan TRANTIBUMLINMAS tidak terhambat. Berkurangnya Jumlah PPNS Penegak PERDA di Kabupaten/Kota disebabkan oleh rotasi/mutasi pejabat struktural dan non struktural dan memasuki masa usia pensiun. Pada tahun 2024. disamping pemenuhan kuantitas PPNS, Penguatan Peran serta peran PPNS melalui peningkatan kapasitas serta karier SDM PPNS perlu untuk dilaksanakan pembinaan secara intensif, agar Tugas dan Fungsi PPNS dalam Penegakan Produk Hukum Daerah dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan dan penurunan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah terlihat dari keberhasilan penyelenggaraan/pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada organisasi.

3.1. Upaya-Upaya Yang telah Dilakukan

Pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.703.082.885,- dengan realisasi Rp. 19.579.177.315,- atau 78.40% sedangkan fisik 100%, walaupun pada umumnya program ini kebanyakan membayar honor petugas operasional/ jaga/ petugas pendukung keamanan dan ketertiban Masyarakat dari non PNS yang berjumlah 198 orang tetapi kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum baik berupa Pengamanan/Pengawasan penegakkan Peraturan Daerah atau kegiatan Patroli

wilayah serta Patroli Damkar sehingga diharapkan situasi yang kondusif di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik pada saat Pilkada serentak atau situasi biasa-biasa (tidak pada Pilkada) juga keadaan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali yang merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dalam upaya untuk lebih meningkatkan ekonomi/kehidupan. Hal itu akan dapat tercapai apabila tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalsel dapat secara optimal dilaksanakan dilapangan, disinilah peran dan tugas dari Bidang Pengendalian Operasional untuk dapat mengendalikan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dapat ditegakkan dengan baik.

Diharapkan masyarakat lebih pemahaman tahu terhadap hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Hukum/PERDA,PERGUB dapat meningkat dari tahun ke tahun, karena karakter Perda yang mendorong masuknya investasi ke daerah akan membawa keberuntungan atau paling tidak diharapkan dapat ikut meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008

Program ini terdiri dari kegiatan berupa :

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.19.741.514.685, dengan realisasi sebesar Rp. 18.966.917.911. Kinerja Kegiatan ini adalah terciptanya keadaan yang aman dan terkendali pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan pejabat berupa :

Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Lokasi :

1. Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan
2. Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
3. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kantor SETDA Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kantor Gubernur Lama

Output : Pada Lokasi/Aset/Objek Vital Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan Penjagaan oleh Anggota Satpol.PP dan Damkar Prov.Kalsel dengan system shift.

Selama dilaksanakan tugas Piket/Penjagaan tersebut, keadaan di lokasi aman dan terkendali.

Kegiatan Pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel Pada Setiap Acara/Kegiatan yang dihadiri, lokasi : Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, waktu : Periode Bulan Januari s/d Desember 2024

Output : Selama dilaksanakan Pengamanan, kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel dengan berjalan lancar dan aman terkendali daerah atau nasional.

Selama tahun 2024 kegiatan-kegiatan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali karena dalam pelaksanaannya juga dibantu dari Pihak POLRI dan TNI, namun begitu, program kegiatan lainnya sebagai kegiatan penunjang/pendukung berperan penting seperti Kegiatan ; Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah,

Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sub sub kegiatan yang ada di sekretariat.

TABEL
JUMLAH PATROLI TRANTIBUM DAN TRANMASY
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024

URAIAN	TAHUN				%
	2021	2022	2023	2024	
Patroli TRANTIBUM	16.000 Patroli	16.000 Patroli	16.000 Patroli	16.000 Patroli	100%
Patroli DAMKAR	420 Patroli	420 Patroli	420 Patroli	420 Patroli	100%

Sumber : Bid. Ops dan Damkar Satpol.PP dan Damkar 2024

Pelaksanaan Patroli Trantibum dan Damkar Hal ini tentunya perlu terus dilaksanakan dan dibina bahkan dikembangkan sebagai salah satu cara konkrit menciptakan keadaan masyarakat dan daerah yang tertib dan aman terkendali.

- 1) Peningkatan/sosialisasi/koordinasi trantibum terhadap aparaturnya Satpol PP Kab/Kota, Satlinmas Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di era reformasi Demokrasi keterbukaan saat ini khususnya saat akan menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak tahun 2024 diharapkan masyarakat yang berbeda pilihan tetap bersatu menjaga per NKRI. Disinilah juga diharapkan peran peting Satpol.PP dan Damkar untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum baik perannya sebagai lembaga maupun sebagai anggota masyarakat, merespon, mendeteksi, dan mengantisipasi gejolak ketentraman dan keteriban umum lebih dini,

maupun sub peran satlinmas yang juga saat ini menjadi bagian dari Satpol.PP dan Damkar diharapkan menjadi pioner di lingkungan atau informan kepada aparat keamanan lainnya yang bertugas menjaga kondisi ketentraman dan keteriban umum serta tanggap bencana atau musibah berupa banjir atau bahaya kebakaran lingkungan perumahan dan hutan. Sejumlah potensi yang mendukung upaya menciptakan ketentraman dan keteriban umum adalah, antara lain:

- a) Peran serta masyarakat dalam memahami Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah.
- b) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran.
- c) Partisipasi unit kerja pendukung penegak peraturan perundang-undangan seperti TNI/ Polri, Kejaksaan dll

3.2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2024 dalam melaksanakan pencapaian kinerja organisasi Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah dan Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, hambatan yang dialami oleh organisasi antara lain :

- 1) Perlunya penguatan terhadap kelembagaan OPD Satpol PP & Damkar serta Kompetensi/Personil dilingkungan Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan serta penyuluhan atas Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal dilaksanakan, dikarenakan minimnya Pendanaan serta belum adanya SDM Khusus penyuluh TRANTIBUM pada SATPOL PP & DAMKAR Prov. Kalsel.
Dengan adanya Pembinaan, Pengawasan serta penyuluhan yang intens dilaksanakan, diharapkan pemahaman masyarakat dapat meningkat serta menurunkan angka pelanggaran gangguan TRANTIBUM.
- 3) Belum maksimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara OPD lingkup Pemprov.Kalsel pengampu PERDA Teknis dengan SATPOL PP Prov.Kalsel selaku Penegak PERDA

- 4) Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan.
- 5) Kurangnya jumlah personil yang berkualifikasi pendidikan minimal S1 (Strata 1) pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel. mengingat bahwa hampir semua jenis DIKLAT yang diselenggarakan oleh KEMENDAGRI (Terkait peningkatan Kapasitas SATPOL PP & DAMKAR) mengharuskan berpendidikan minimal S1.
Sejak tahun 2022 telah diusahakan untuk melakukan pengusulan alokasi ASN Teknis TRANTIBUMLINMAS dengan Instansi terkait. Pada tahun 2023 dan 2024 secara bertahap telah diakomodir oleh BKD Prov.Kalsel, namun kebutuhan yang dapat direalisasikan tersebut belum maksimal sesuai dengan rencana kebutuhan ASN pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel.
- 6) Perlunya dukungan peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan pada SATPOL PP & DAMKAR untuk memenuhi kualifikasi teknis/kompetensi SATPOL PP & DAMKAR sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Perlunya pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki organisasi SATPOL PP & DAMKAR, sebagaimana SARPRAS Minimal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS maupun PEMADAM KEBAKARAN & Penyelamatan.
- 8) Bencana kebakaran hutan, lahan dan permukiman merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi terlebih disaat perubahan cuaca yang ekstrem.

3.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta meminimalisir hambatan kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, ditetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Rencana Kinerja di tahun berjalan dan tahun yang akan datang dengan memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien serta skala prioritas kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Instansi terkait, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta bahaya kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan. Telah dilakukan usaha melalui peningkatan koordinasi dengan Biro Hukum SETDA Prov.Kalsel, tetapi terbatas pada Produk hukum yang belum atau akan disusun.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait khususnya SKPD di Provinsi serta Kab/Kota, dalam hal penegakan PERDA dan PERKADA yang diampu oleh masing-masing SKPD teknis, agar kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA dapat terus meningkat.
- 4) Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas Personil berdasarkan skala prioritas kebutuhan organisasi
- 5) Memaksimalkan pemberdayaan SDM pada Satpol PP & DAMKAR Prov.Kalsel sesuai bidang teknis

4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program program yang dilaksanakan selama tahun 2024, yaitu :

a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
 - Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - Sub kegiatan :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
- b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub kegiatan :
 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

3. Capaian Kinerja Eselon III

1.1 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Pelayanan Sarana dan Prasana Administrasi Perkantoran	360 Dokumen	3048 Dokumen	100%
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar	5 Orang	94 Orang	1020%
		Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2023	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	A	A	A	A	100%
2	Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Persentase Dokumen Administrasi	654	1777	360	3048 Dokumen	100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2023	2023	Target	Realisasi	% Capaian
	Perkantoran dan Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	Dokumen		
	Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian	54 Orang	51 Orang	52 Orang	94 Orang	1020%
	Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian						100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator **Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar** tahun 2024 adalah sampai saat ini masih belum ada, dari Target Nilai A. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat laporan kinerja ini dibuat, pelaksanaan penilaian Sakip yang dilakukan oleh Tim SAKIP Kalsel yang terdiri dari Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.

Tentunya capaian ini satu peringkat dari target nilai A yang ingin dicapai dan jika dipersentasekan maka capaiannya hanya sebesar 81,50% untuk Tahun 2022 dengan kategori sangat baik. Adapun cara perhitungan untuk memperoleh persentase capaiannya yaitu dengan membagi urutan nilai SAKIP yang diperoleh dengan urutan penilaian SAKIP yang ditentukan yaitu (D, C, CC, B, BB, A, AA), sebagaimana diketahui posisi urutan BB berada pada urutan ke 5 dari 7 urutan penilaian SAKIP, maka didapatkan persentase capaiannya yakni sebesar 81,95% untuk Tahun 2023.

Pencapaian Indikator **Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan** tahun 2023 Terealisasi 5 Dokumen Dari Target 5 Dokumen. Capaian indikator ini berhasil menecapai target yang ingin dicapai yaitu 100%, sehingga capaiannya adalah 100% dan dikategorikan memuaskan.

Pencapaian Indikator **Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian** tahun 2024 Terealisasi 3048 Dokumen Dari 360 Dokumen. Capaian indikator ini berhasil dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu

100% dimana capaian pada tahun ini berhasil sesuai yang diharapkan yaitu 100%, sehingga dapat dikategorikan sangat memuaskan.

Pencapaian Indikator **Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian** tahun 2024 Terealisasi 51 Orang Dari Target 50 Orang. Capaian indikator ini berhasil mencapai target yang ingin dicapai yaitu 100%, sehingga capaiannya adalah 1020% dan dikategorikan sangat memuaskan.

Pencapaian Indikator **Persentase Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar** tahun 2024 Terealisasi 1 (satu) laporan Dari Target 1 (satu) laporan. Capaian indikator ini berhasil sebagaimana target yang ingin dicapai yaitu 100%, sehingga capaiannya adalah 100% dan dikategorikan sangat memuaskan. Pelaksanaan pencatatan aset dan dokumen keuangan dapat terlaksana dengan baik pada tahun ini, dimana seluruh laporan keuangan dan aset disusun sebagaimana jadwal yang ditentukan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

1. Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar

Sebagaimana diketahui bahwa data untuk penilaian untuk penilaian SAKIP tahun 2023 terjadi peningkatan untuk perolehan pada tahun 2022 dimana Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel memperoleh nilai A, namun peningkatan hanya sebatas nol koma saja. Kemudian untuk perbandingan secara regional ataupun secara nasional data perbandingan tidak dapat disajikan karena untuk indikator ini belum dapat dipastikan bahwa terjadi kesamaan indikator pada masing – masing provinsi yang ada di pulau Kalimantan hal ini juga didukung dengan dokumen resmi yang dipublikasikan melalui website Satpol PP dan Damkar (www.satpolppdamkar.kalselprov.go.id) yang ada di regional kalimantan sehingga pada saat dokumen ini dibuat data – data tersebut.

2. Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan

Capaian Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan pada tahun 2021 dan 2024 adalah sama yakni berada pada angka 100%. Kemudian untuk perbandingan secara regional ataupun secara nasional data perbandingan

tidak dapat disajikan karena untuk indikator ini belum dapat dipastikan bahwa terjadi kesamaan indikator pada masing – masing provinsi yang ada di pulau Kalimantan hal ini juga didukung dengan dokumen resmi yang dipublikasikan melalui website Satpol PP dan Damkar (www.satpolppdamkar.kalselprov.go.id) yang ada di regional kalimantan sehingga pada saat dokumen ini dibuat data – data tersebut.

3. Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian

Capaian indikator ini pada tahun 2021 dan 2024 adalah 100%, serta untuk tahun 2023 dan 2024 melebihi target 100%, hal ini disebabkan Pencapaian Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat pada tahun 2024 yang terdiri dari 3048 Surat Keluar, SK (Surat Keterangan) dan Nota Dinas/Persetujuan.

4. Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian

Pencapaian Indikator Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan tahun 2024 terealisasi sebanyak 51 orang dari target 5 orang , sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Pencapaian ini meliputi peningkatan terhadap pengelolaan keuangan, bendahara barang, arsiparis, operator aplikasi di keuangan ,bimtek kepegawaian serta workshop peningkatan kapasitas ASN seluruh personil Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel.

5. Persentasi Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar

Capaian indikator ini pada tahun 2023 dan 2024 adalah sama yakni berada pada angka 100%. Pada tahun 2024 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 41.157.502.185** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.102.964.379** atau sebesar **95.01 %** dan realisasi fisik **100%**, sedangkan Untuk tahun 2023 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 34.012.365.655** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 32.827.298.270** atau sebesar **96,51 %** dan realisasi fisik **100%**.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar

1. Upaya yang telah dilakukan dalam Peningkatan nilai SAKIP :
 - ✓ Melaksanakan evaluasi secara berkala per triwulan terhadap capaian kinerja yang belum tercapai.
 - ✓ Melibatkan Eselon II dalam setiap kesempatan Rapat Evaluasi baik formal maupun non formal dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.
 - ✓ Membuat SOP Penyusunan LKJ IP.
 - ✓ Melakukan penyempurnaan terhadap indikator – indikator kinerja.
 - ✓ Membuat laporan progres per bulan per bidang per sub terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja.
2. Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Peningkatan nilai SAKIP :
 - ✓ Kurangnya kualitas indikator kinerja khususnya pada eselon IV yang masih ditingkatkan output dan belum pada level outcome menengah (intermediate).
 - ✓ Kurangnya data dalam perhitungan indikator kinerja.
 - ✓ Pemahaman terhadap perumusan antara kerja dan kinerja masih belum menyeluruh.
 - ✓ Keterlambatan dan kurangnya informasi yang disajikan sebagai bahan penyusunan LKPJ dan LAKIP.
 - ✓ Diharapkan partisipasi bidang teknis pada pelaksanaan rapat evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP.
3. Rencana tindak lanjut dalam peningkatan nilai SAKIP :
 - ✓ Melakukan penyempurnaan terhadap indikator berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi kepada instansi atau Lembaga terkait untuk pengumpulan data yang tidak dimiliki
 - ✓ Meningkatkan pemahaman ASN terhadap perumusan indikator kinerja dengan melibatkan Tim Sakip sebagai narasumber.
 - ✓ Memberikan format yang sesuai dengan juknis penyusunan LKj IP.
 - ✓ Melibatkan partisipasi bidang teknis pada kesempatan penyampaian evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Kalsel.

b. Persentase Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan

Upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan :

- ✓ Melakukan inventarisasi terhadap rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) untuk selanjutnya diproses kepada bagian perlengkapan yang ada di BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatan.
- ✓ Melakukan proses penganggaran terhadap pengadaan barang / jasa dan pengadaan belanja modal dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas pemenuhannya.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan :

- ✓ Adanya usulan sarana dan prasarana yang diusulkan oleh Bidang Teknis yang masih perlu dikoordinasikan dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
- ✓ Beberapa pengadaan sering terkendala terhadap penjadwalan seperti pengadaan yang melalui proses seleksi (lelang). Atau ketersediaan dalam penyedia dalam aplikasi e-catalog

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan :

- ✓ Memastikan finalisasi usulan RKBMD yang telah disusun oleh masing – masing bidang untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan.
- ✓ Memastikan kesesuaian terhadap inputan penganggaran belanja modal dengan RKBMD.
- ✓ Mengikuti proses administrasi terhadap pengadaan dengan metode lelang dan segera melakukan progres ulang terhadap pelaksanaan lelang yang batal.
- ✓ Berkoordinasi secara intense dengan pihak pengadaan barang jasa di ULP Pemprov Kalsel.
- ✓ Kebutuhan barang menjadi dasar temuan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mencapai pelayanan Trantibumlinmas dalam hal urusan wajib.

c. Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian

Upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan ASN yang memiliki sertifikat dan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN :

- ✓ Menyusun dan menetapkan ASN yang memenuhi persyaratan mengikuti pelatihan/ diklat untuk mendapat sertifikat
- ✓ Melaksanakan SOP terhadap pengusulan berkas kepegawaian.
- ✓ Melakukan pencatatan (penjadwalan) sebagai control terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian ASN.
- ✓ Memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi untuk mengingatkan ASN yang bersangkutan agar memproses berkas kepengurusannya.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam pemenuhan ASN yang memiliki sertifikat dan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN :

- ✓ Diharapkan aktifnya ASN yang ingin mengikuti untuk mendapat sertifikat, yang mana IP ASN Satpol PP Damkar Prov. Kalsel dengan nilai 76.81
- ✓ Minimnya respon ASN yang bersangkutan terhadap pemberkasan kepegawaian.
- ✓ Ketidaklengkapan berkas yang disusun oleh ASN bersangkutan.

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan ASN yang memiliki sertifikat dan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN :

- ✓ Memberitahukan ASN yang memenuhi persyaratan diharapkan untuk mengikuti dan mendapatkan sertifikat untuk menunjang IP ASN Satpol PP Damkar Prov. Kalsel.
- ✓ Menyampaikan informasi kepada ASN yang akan segera memasuki masa pengelolaan berkas kepegawaiannya.
- ✓ Menyampaikan informasi kelengkapan berkas yang harus disiapkan ASN untuk pengelolaan berkas kepegawaian.

d. Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang memiliki Sertifikat Keahlian

Upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan peserta pelatihan/ bimtek yang paham :

- ✓ Menyeleksi peserta bimtek sesuai dengan pendidikan dan keahlian
- ✓ Menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan/ bimtek

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam pemenuhan peserta pelatihan/ bimtek yang paham :

- ✓ Terbatasnya peserta yang memenuhi persyaratan
- ✓ Peserta atau personil untuk berminat mengikuti pelatihan/ bimtek

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan peserta pelatihan/ bimtek yang paham ;

- ✓ Menyampaikan informasi kepada peserta untuk mengikuti pelatihan/ bimtek
- ✓ Menyampaikan informasi kelengkapan berkas yang harus disiapkan peserta untuk mengikuti pelatihan/ bimtek.

e. Persentasi Penyerapan Anggaran Satpol PP dan Damkar

Upaya yang telah dilakukan dalam pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan ;

- ✓ Melakukan pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan
- ✓ Melaksanakan SOP terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- ✓ Melaksanakan SOP terhadap inventarisir aset.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan :

- ✓ Adanya reklas terhadap beberapa belanja barang dan jasa menjadi belanja modal.
- ✓ Keterlambatan dalam penyelesaian laporan kegiatan oleh PPTK sebagai bahan pemberkasan dokumen keuangan.

Rencana tindak lanjut dalam pemenuhan pencatatan terhadap aset dan dokumen keuangan :

- ✓ Memastikan kode rekening belanja terhadap pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa ataupun belanja modal.
- ✓ Memastikan PPTK agar segera mengumpulkan laporan kegiatannya sebelum melakukan proses pencairan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 2. Pengadaan Mebel.
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3.1 Capaian Kinerja Esselon IV

3.1.1 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Pelayanan Administrasi Keuangan	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian					

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala	1 dok	1 dok	1 dok	100%
2	Jumlah Aset Yang Tercatat	1 dok	1 dok	1 dok	100%
3	Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasana	1 dok	1 dok	1 dok	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala Tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen laporan , sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100 %.

Pencapaian Indikator Jumlah Aset Yang Tercatat tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasana tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala

Penyusunan Dokumen laporan Keuangan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100 % (seratus persen) begitu juga dengan tahun 2024 yang terealisasi 1 dokumen laporan. Adapun dokumen laporan keuangan ini menyajikan diantaranya **Neraca** yaitu menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, **Laporan Operasional (LO)** yaitu hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui sebagai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)** yang mana ekuitas tersebut adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah asset dengan jumlah kewajiban, **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** yaitu semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah, **Laporan Persediaan** yang mana persediaan tersebut adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD dan juga asset yang terdiri atas asset lancar, asset tetap dan asset lainnya. Asset tetap yaitu asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sedangkan asset lainnya adalah asset tetap yang diberhentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi asset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

b. Jumlah Aset Yang Tercatat

Pencatatan asset dalam bentuk dokumen terealisasi pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen dengan target 1 (satu) dokumen dengan capaian 100% (seratus persen) yang dikompilasi dalam satu laporan keuangan, begitu juga dengan tahun 2024 dan tahun sebelumnya, adapun asset yang tercatat dalam satu dokumen dimaksud yaitu barang / perlengkapan yang telah dibeli atau diperoleh atas yang dibebankan pada

DPA SKPD Satpol. PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatanya yang terdiri atas Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya.

c. Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasana

Penyimpanan dokumen terkait sarana dan prasarana sebanyak 1 (satu) dokumen pada tahun 2024 yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen dengan pencapaian 100% (seratus persen) begitu juga dengan tahun sebelumnya, sebagai contoh seperti pembelian/perolehan atas peralatan mesin yang terdiri atas alat – alat angkutan (mobil baik itu truck) angkutan penumpang dan / barang) yang mempunyai dokumen (STNK, BPKB) disimpan oleh pengurus barang dalam satu dokumen, begitu juga barang milik daerah lainnya yang dilaporkan secara periodek kepada Badan Keuangan Daerah cq bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (aset).

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Upaya yang telah dilakukan

Koordinasi kepada SKPD Pembina dalam penyelesaian laporan keuangan baik itu penyusunan laporan keuangan, pencatatan asset dan penyimpanan dokumen khususnya bidang akuntansi pengelolaan barang milik daerah (asset) sebagai salah satu upaya untuk mengolah data yang akuntabel.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Tidak ada hambatan.

c. Rencana tindak lanjut

Karena tidak adanya hambatan maka tidak ada rencana tindak lanjut, namun pola – pola seperti koordinasi secara intensif terus dilakukan baik melalui rekonsiliasi data hardcopy maupun softcopy dan lainnya juga.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Di Tahun akhir TA 2024 Satpol PP & Damkar Provinsi telah memajukan terhadap penambahan pagu atas kegiatan, yang mana telah diakomodir dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan lainnya OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diajukan.

3.1.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat – menyurat	360	3048	100%
		Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib	50	94	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	5	51	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat	1777 Dok	360Dok	3048	100%
2	Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib	58 Dok	50 Dok	94 Dok	100%
3	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan	51 Org	5 Org	5 Org	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat Tahun 2024 terealisasi sebanyak 3048 dokumen (yang terdiri dari pelayanan

surat keluar, surat Keputusan Kepala Satuan dan pelayanan penomoran Surat Perintah Tugas) baik yang dilaksanakan penandatanganan secara elektronik TTE ataupun tanda tangam basah dari target 360 dokumen, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100 % lebih.

Pencapaian Indikator Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaian dilayani Secara Tertib tahun 2024 terealisasi sebanyak 94 dokumen berkas kepegawaian (perorangan) baik dari sisi kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Dokumen Cuti, Koordinasi SK Jabatan dan SK Penempatan Pelaksana dari target 50 dokumen, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100 % lebih.

Pencapaian Indikator Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan tahun 2024, Dimana sesuai ketentuan di dalam UU 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa setiap ASN mempunyai hak pelatihan pengembangan karir minimal 20jp setiap tahun, bahwa pada Satpol PP dan Damkar seluruh PNS sebanyak 52 orang telah mengikuti pelatihan minimal 20 jp / tahun, sehingga IP ASN Satpol PP dan Damkar Prov.Kalsel berada pada angka 76,81 atau berada diatas rata-rata IP ASN Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan realisasi sebanyak 51 orang dari target 5, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100% lebih.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat

Pencapaian Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat pada tahun 2024 yang terdiri dari 3048 Surat Keluar, SK (Surat Keterangan) dan Nota Dinas/Persetujuan.

b. Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaian dilayani Secara Tertib

Pencapaian Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani Secara Tertib pada tahun 2024 sebanyak 94 dokumen yang dilayani terhadap kepangkatan, Pensiun dan berkala ASN di lingkungan Satpol PP & Damkar Prov. Kalsel

c. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM

Pencapaian Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan pada tahun 2024 sebanyak 51 orang dari target 5. Peningkatan terhadap pengelolaan

keuangan, bendahara barang, arsiparis, operator aplikasi di keuangan dan bimtek kepegawaian lainnya.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Upaya yang telah dilakukan

Melaksanakan program yang sudah tersusun secara maksimal dengan melaksanakan koordinasi di Internal kesekretariatan

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Terbatasnya SDM pelaksana, karena hanya ada 1 (satu) staf pelaksana yang membantu secara keseluruhan pelaksanaan program dimaksud ditambah pendataan data tenaga honorer.

d. Rencana tindak lanjut

Perlu perbaikan pentapan target kinerja yang lebih akurat.

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

a. Jalannya program sarana prasarana administrasi perkantoran didukung koordinasi yang baik di Internal Sekretariat sebagai penunjang kinerja Satuan

b. Dari ASN yang ada pada Satuan, terkait pelayanan administrasi perkantoran bahwa tidak semua pegawai /ASN yang berurusan dengan administrasi kepegawaian seperti Pensiun, Mutasi, Naik Pangkat, Kenakaikan Gaji Berkala setiap tahunnya.

c. Perlu perbaikan penetapan target kinerja baik secara administrasi dalam dalam mengejar target.

3.1.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja Satpol PP Damkar	5 Laporan	5 Laporan	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan Tahun 2024 terealisasi sebanyak 5 Laporan dari target 5 Dokumen, yaitu ; LAKIP, LKPI/SPM, RENSTRA, RENJA, PRA-RKA) sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan

Pada tahun 2024 jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaporan 5 Dokumen, dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaporan yang tercapai 5 Dokumen.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan.

Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun sesuai ketentuan Tahun 2024 sebanyak 5 Dokumen untuk SKPD Satpol PP & Damkar yang direncanakan dan disiapkan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program di Satpol PP & Damkar yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi dan Analisa Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rata-rata dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai, dan ditingkatkan lagi dengan melakukan koordinasi semua unsur sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target dalam mencapai sasaran kinerja yaitu dengan :

1. Meningkatkan kinerja pejabat dari eselon II, III, dan IV agar program dan kegiatan yang berjalan dapat terlaksana secara maksimal sehingga realisasi capaian kinerja sesuai target.

Melakukan pengukuran kinerja individu sampai dengan eselon IV secara berkala agar indikator kinerja dapat tercapai sesuai target. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui sarana dan sumber daya manusianya.

2.1 Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparatur terhadap produk hukum	100%	100%	100%
		Meningkatkan peran petugas penegak produk hukum dalam penyidikan dan peyelidikan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Masyarakat dan Aparatur Yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Petugas PPNS/Sekre Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian Indikator Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah Tahun 2024 100% dari Target 100%

Pencapaian Indikator tahun 2024 Terealisasi Persentase Petugas PPNS/Sekre dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun 100% dari Target 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Persentase Masyarakat dan Aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah.

Pencapaian atas realisasi persentase masyarakat dan aparaturnya yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah pada tahun 2024 dengan persentase 100%, dengan dukungan perencanaan dan kegiatan bidang teknis terkait di tahun 2024 dapat terlaksana.

- b. Persentase Petugas PPNS/Sekre dalam penyelidikan dan penyidikan pertahun

Pencapaian atas realisasi persentase petugas PPNS/Sekre Dalam Penyelidikan dan Penyidikan pertahun pada tahun 2024, dengan dukungan aturan teknis peraturan perundang undangan, perencanaan dan kegiatan kegiatan pada bidang teknis terkait ditahun 2024 dapat terlaksana 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2024 dengan dilaksanakannya pemilu serentak tahun 2024 dan menjadi bagian dalam proses pelaksanaannya, maka tidak mengurangi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar dalam mengawal Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dinilai cenderung meningkat.

- a. Persentase Masyarakat dan Aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah
 - Upaya yang telah dilakukan : melakukan koordinasi dengan Satpol PP se Kalsel dalam melakukan Sosialisasi tentang produk Hukum daerah dan pelaksanaannya.
 - Hambatan dalam pencapaian kinerja : minimnya dukungan anggaran kegiatan penyuluhan/sosialisasi untuk memenuhi kualifikasi masyarakat dan aparatur yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah.
 - Rencana tindak lanjut : Merencanakan program dan kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi tentang produk hukum daerah dan peningkatan penegakan perda/permendagri dengan cara menjalin koordinasi yang baik dengan pusat dan Satpol PP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Persentase Petugas PPNS/Sekre dalam Penyelidikan dan Penyidikan pertahun
 - Upaya yang dilakukan : secara berkala melakukan koordinasi ke pusat dan Kab/Kota mengenai penegakan Perda, melakukan evaluasi dan monitoring penegakan perda oleh Satpol PP se Kalsel.
 - Hambatan dalam pencapaian kerja : Minimnya jumlah sumberdata aparatur sehingga tidak sebanding dengan analisis beban kerja yang.
 - Rencana tindak lanjut : Koordinasi dengan Pusat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS sebagai penegak perda, dan khususnya koordinasi dalam hal data penegakkan Perda atau Perkada Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program program yang dilaksanakan selama tahun 2024, yaitu :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dari target 1 dokumen pada tahun 2024 ini dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen, yakni telah berhasil membuat sebanyak 2 SOP, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

- Sub kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, dari target 1 Laporan pada tahun 2024 ini dapat terealisasi sebanyak 1 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

- Sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dari target 2 Laporan pada tahun 2024 ini dapat terealisasi sebanyak 2 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

- Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dari target 4 Laporan pada tahun 2024 ini dapat terealisasi sebanyak 4 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

- Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dari target 4 Laporan pada tahun 2024 ini dapat terealisasi sebanyak 4 Laporan, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- -Sub kegiatan : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, dari target 1 Dokumen pada tahun 2024 ini dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen, sehingga persentase capaian berjumlah 100%

3.2. Capaian Kinerja Esselon IV

3.2.1 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Produk Hukum Daerah	Sosialisasi produk hukum terkait sanksi administrasi dan pidana	2 Produk Hukum 100 Orang	2 Produk Hukum 100 Orang	100%
		Pembinaan sekretariat PPNS	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2022		
		2021	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Produk Hukum Yang Disosialisasikan	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100 %
2	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi tentang Produk Hukum Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %
3	Jumlah PPNS yang dibina	6 Laporan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100 %
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian Indikator Jumlah Produk Hukum Yang Disosialisasikan Tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 Produk Hukum dari target 2 Produk Hukum, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Aparatur Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah tahun 2024 terealisasi sebanyak 100 orang dari target 100 orang, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah PPNS yang dibina tahun 2024 terealisasi sebanyak 13 Kab/Kota dari target 13 Kab/Kota, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Produk Hukum Yang Disosialisasikan

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Produk Hukum yang

disosialisasikan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 (dua) Produk Hukum dari target sebanyak 2 (dua) Produk Hukum, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2024 pencapaian realisasi kinerja serta

capaian kinerja jumlah produk hukum yang disosialisasikan terealisasi sebanyak 2 (dua) Produk Hukum dari target sebanyak 2 (dua) Produk Hukum, sehingga capaian persentasenya 100%.

Adapun Produk Hukum yang disosialisasikan yaitu,

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 100 orang dari target sebanyak 100 orang, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2024 pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah terealisasi sebanyak 100 orang dari target sebanyak 100 orang, sehingga capaian persentasenya 100%.

c. Jumlah PPNS yang dibina

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah PPNS yang dibina pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 13 Kab/Kota Laporan dari target sebanyak 13 Kab/Kota, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2024 pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Laporan Korwasdalev Pol PP dan Damkar terealisasi sebanyak 6 Laporan dari target sebanyak 6 Laporan, sehingga capaian persentasenya 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian di tahun 2024, capaian kinerja pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan tidak mengalami penurunan kinerja.

a. Upaya yang telah dilakukan

- Secara selektif melakukan pendataan terhadap aturan-aturan produk hukum daerah, baik berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur, khususnya yang bermuatan sanksi-sanksi.
- Melakukan evaluasi dan monitoring produk-produk hukum yang telah disosialisasikan terhadap implementasinya secara berkelanjutan.
- Mengubah pola pemanggilan aparatur yang akan menerima sosialisasi menjadi pola sistem jemput bola di tempat yang sudah ditentukan untuk diberikan sosialisasi agar tujuan meningkatnya pemahaman aparatur menjadi tepat sasaran efektif dan efisien.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Minimnya jumlah sumberdata aparatur sehingga tidak sebanding dengan analisis beban kerja yang ada pada kasi binwasluh

c. Rencana tindak lanjut

- Tetap melakukan investarisasi produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun keputusan gubernur secara berkelanjutan.
- Lebih giat melakukan koordinasi dan sharing dengan Pol PP Kab/kota terkait monitoring terhadap informasi data-data pelanggaran produk hukum daerah di wilayah kalimantan selatan
- Memaksimalkan peran dan fungsi sumber daya aparatur yang dimiliki.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sbb:

- 1) Adanya komitmen dan konsistensi pimpinan terhadap program atau kegiatan yang telah disusun agar bisa terselenggara secara keseluruhan

- 2) Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan untuk memastikan efesiensi dan efektifitas program/kegiatan serta penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.

3.2.2 Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Peran Petugas Penegak Produk Hukum dalam Penyelidikan dan Penyidikan	Penyelenggaraan Penegakan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100%
		Fasilitasi permasalahan terhadap pelanggaran produk hukum	100 Orang	100 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Ditegakkan	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100%
2	Jumlah Permasalahan/Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Difasilitasi/Mediasi	200 Orang	100 Orang	100 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan target

Pencapaian Indikator Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakan Tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 Produk Hukum dari target 2 Produk Hukum, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Permasalahan Pelanggaran Yang Difasilitasi/Mediasi tahun 2024 terealisasi sebanyak 100 Pelanggaran dari target sebanyak 100 Pelanggaran, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakan

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Produk Hukum Yang Ditegakan pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 Produk Hukum dari target sebanyak 2 Produk Hukum, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Adapun produk hukum yang ditegakkan antara lain

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraab Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

b. Jumlah Produk Hukum yang rutin dilaksanakan pengawasan berdasarkan informasi dan laporan

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengendalian Muatan Mobil di Jalan
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permuseuman
- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan Di Kalimantan Selatan
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 Kegiatan

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan

c. Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Produk Hukum Daerah

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Permasalahan Pelanggaran Yang Difasilitasi/Mediasi pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 200 Pelanggaran dari target sebanyak 200 Pelanggaran, sehingga capaian persentasenya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja Jumlah Permasalahan Pelanggaran Yang Difasilitasi/Mediasi terealisasi sebanyak 100 Orang dari target sebanyak 100 Orang, sehingga capaian persentasenya 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya yang telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sesuai target dan dokumen anggaran tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan target kinerja. Jumlah target penegakan perda sebanyak 2 Produk Hukum, dapat terealisasi 2 Produk Hukum. Sedangkan permasalahan yang dapat difasilitasi sebanyak 100 Orang dapat dicapai sesuai target 100 Orang. Penurunan capaian kinerja ini menggambarkan semakin berkurangnya pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah dan dapat disimpulkan bahwa semakin berkurang Orang/Masyarakat yang melanggar hukum dan semakin meningkatnya kesadaran Hukum bagi masyarakat.
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja, ada beberapa faktor yang jadi kendala dalam melaksanakan tugas yaitu, Perubahan situasi dan kondisi yang signifikan yang mana Program kita harus menyesuaikan kondisi dimana sepanjang tahun 2024 konsen terfokus pada suasana pemilu serentak dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada serentak tanpa mengurangi konsentrasi terhadap potensi pelanggaran Perda dan Perkada yang sering terjadi
- c. Rencana tindak lanjut, melakukan evaluasi hasil dan memetakan terhadap Perda dan Perkada yang memiliki resiko tinggi dimasa akan datang.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Kepala SKPD sebagai pengarah dalam melaksanakan program kegiatan sekaligus penentu kebijakan dan eksekutor.
2. Kepala Bidang PPHD sebagai pembimbing atau koordinator untuk melaksanakan kegiatan yang ada pada seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Perlunya Koordinasi Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kab/kota dalam hal sesuai tufoksi khususnya dalam hal Penegakkan Perda dan Perkada (data penegakkan).

3.1 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana	100 %	100%	100%
		Meningkat Peran Satlinmas dan Damkar	100 %	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tingkat Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang Sigap dan Terampil	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentasi Satlinmas dan Damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan Trantib, Bahaya Kebakaran dan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian						100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator **Tingkat Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar kab/kota yang Sigap dan Terampil** tahun 2024 100% dari target 100%

Pencapaian Indikator **Persentasi Satlinmas dan Damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan Trantib, Bahaya Kebakaran dan Bencana** tahun 2024 100% dari target 100%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

2.1 Pencapaian atas realisasi tingkat responsibilitas aparatur satlinmas dan damkar kab/kota yang sigap dan terampil tahun 2023 dengan persentasi 100%, sedangkan tahun 2024 pencapaian sebesar 100% ini berarti realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan.

2.2 Pencapaian atas realisasi persentasi satlinmas dan damkar kab/kota yang aktif dalam penanganan trantib, bahaya kebakaran dan bencana tahun 2023 dengan persentasi 100%, sedangkan tahun 2024 pencapaian sebesar 100% ini berarti realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan.

3. Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

3.1 Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan responsibilitas aparatur satlinmas dan damkar di tahun 2024 dilakukan dengan:

- Melaksanakan program dan kegiatan koordinasi, bimtek, sosialisasi dan monitoring di 13 Kab/Kota di Kalsel terkait Linmas dan Damkar;
- Merumuskan program dan kegiatan pengembangan/peningkatan kapasitas aparatur LINMAS dan DAMKAR untuk memperoleh keterampilan dan keahlian dari berbagai pelatihan berbasis kualifikasi dan kompetensi;
- Melakukan monitoring program/kegiatan aparatur linmas dan damkar se Kalimantan Selatan dalam rangka pengamanan pemilu, pilpres dan pilkada serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Peningkatan kompetensi Aparatur Damkar se Kalimantan Selatan melalui pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran kualifikasi pemadam 1 (satu) angkatan ke-5 dan kualifikasi basic rescue angkatan ke-1;
- Melaksanakan Pelatihan Atau In House Training Diklat Basic Rescue Angkatan I untuk Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Se-Kalsel dengan mengundang Narasumber atau instruktur dari Kemendagri dan Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kompetensi Aparatur Damkar di kabupaten/kota wilayah provinsi Kalimantan;
- Melaksanakan Pembinaan Relawan Kebakaran Kabupaten Kota Se-Kalsel;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan satlinmas dalam rangka pencegahan kejadian bencana, ketertiban dan ketentraman sosial melalui lomba poskamling antar desa/kelurahan se Kalimantan Selatan tahun 2024.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Kurang dan perlu pengembangan jumlah Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal Petugas Pemadam Kebakaran/regenerasi petugas damkar;
- Infrastruktur yang belum memadai atau kurang mendukung/perlu pembaruan terhadap peralatan Damkar sesuai standar yang diberlakukan;
- Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki baik secara kuantitas maupun kualitas
- Perlunya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana kebakaran yang dilaksanakan oleh OPD Satpol PP & Damkar secara bertahap dalam tahun ini.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Penyusunan Anggaran pada tahun berikutnya akan direncanakan dan disusun seefektif mungkin sehingga semua kegiatan mendapatkan dana yang mencukupi sesuai dengan pagu yang diberikan;
- Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan Aparatur LINMAS dan DAMKAR dalam penanganan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran;
- Melakukan Koordinasi dan Konsultasi untuk lebih meningkatkan Aparatur LINMAS dan DAMKAR;
- Memaksimalkan fungsi dan peran Aparatur LINMAS dan DAMKAR sebagai garda terdepan penanggulangan Non kebakaran;
- Peningkatan alokasi anggaran APBD/penambahan unit pemadam kebakaran yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025;
- Melakukan upaya percepatan peningkatan kompetensi aparatur linmas dan damkar melalui inovasi pelaksanaan in house training yg efektif dan efisien agar dapat mencetak lebih banyak aparatur yg tersertifikasi kompetensi linmas dan pemadam kebakaran;

- Penguatan upaya pencegahan kebakaran melalui kegiatan antara lain, inspeksi sistem keselamatan kebakaran bangunan gedung, sosialisasi pencegahan kebakaran melakukan inovasi melalui pendidikan dan pelatihan penyuluh lapangan kebakaran;
- Adanya inovasi baru penyebarluasan informasi melalui teknologi/aplikasi yang membantu meningkatkan dalam hal pelaporan kejadian kebakaran yang memudahkan mendapat informasi data kebakaran;
- Akan melaksanakan rapat koordinasi rutin triwulan dengan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja.

- Satlinmas sebagai aparat yang kedudukannya berada di tingkat desa dan kelurahan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan negara, memberikan rasa aman dan membantu ketertiban serta mengurangi resiko akibat bencana yang terjadi. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan meningkatkan kompetensi anggota melalui kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan di wilayahnya. Selain itu satlinmas juga membantu pelaksanaan pemilu dan pemilukada sebagai agenda rutin setiap 5 tahun;
- Perlu adanya pertemuan secara berkala antar instansi yang membidangi urusan kelinmasan dan urusan kebakaran maupun stake holder terkait kebencanaan, pencarian dan pertolongan serta pencegahan kebakaran untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan teknis program kegiatan di wilayah Kalimantan Selatan;
- Penambahan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang berkualitas serta sesuai standar untuk memberikan pelayanan secara lebih optimal dan melindungi petugas pemadam kebakaran dalam bertugas;
- Peningkatan kompetensi anggota Damkar melalui Bimtek/pelatihan dan *in house training* sesuai kualifikasi yang dibutuhkan organisasi;
- Penambahan personel anggota Damkar yang baru

3.3 Capaian Kinerja Esselon IV

3.3.1 Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkat Peran Satlinmas dan Damkar	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
Rata-rata Capaian						100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pada Tahun 2024 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai target sebesar 1 dokumen dengan Capaian 1 dokumen dan Realisasi 100% sama dengan tahun 2023.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya yang telah dilakukan Seksi Linmas di tengah konsiderasi Kesiapsiagaan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.
- Melaksanakan program dan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Aparatur LINMAS 13 Kab/Kota di Kalsel, dengan data anggota Satlinmas di kab/kota pada tahun 2024 (Data Terlampir/menyusul)
 - Melaksanakan kegiatan donor darah Satpol PP dan Damkar serta bersama seluruh SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan PMI Untuk Memenuhi stok kantong darah di Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan 3 kali Kegiatan dalam 1 Tahun dengan target 150 peserta.
 - Melaksanakan pelatihan untuk Satlinmas di kabupaten/kota, Adapun pelatihan tersebut para anggota diberikan materi dan praktek terkait kebencanaan kebakaran, dan praktek pertolongan pertama dari PMI serta praktek kedisiplinan/PBB dari anggota Koramil/Kodim.
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis Aparatur Linmas se Kalimantan Selatan dalam Rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan Serentak pada Tahun 2024.
 - Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka Lomba Poskamling Terbaik Desa dan Kelurahan di 13 Kab/Kota se Kalsel, berikut lampiran pemenang lomba poskamling Tahun 2024.

I. PEMENANG LOMBA POSKAMLING KELURAHAN :

NO	NAMA POSKAMLING	KELURAHAN	KAB/KOTA	PERINGKAT
1	MANDIRI	LOKTABAT SELATAN	BANJARBARU	Juara I
2	KERAMAT JAYA	PARINGIN KOTA	BALANGAN	Juara II
3	BUDAYA	TELAWANG	BANJARMASIN	Juara III
4	KOMPAS	JAWA	BANJAR	Harapan I
5	MTQ	RANTAU KIWA	TAPIN	Harapan II
6	POS KEAMANAN KOPRI	ULU BENTENG	BATOLA	Harapan III

II. PEMENANG LOMBA POSKAMLING DESA :

NO	NAMA POSKAMLING	DESA	KABUPATEN	PERINGKAT
1	POSLINMAS 8	PANDAN SARI	TANAH BUMBU	Juara I
2	BAHUNGIN AMAN	BAHUNGIN	TABALONG	Juara II
3	TAMBALANG KECIL	TAMBALANG KECIL	HSU	Juara III
4	BERSINAR	DESA BARU	HSS	Harapan I
5	RT. 17	BUMI JAYA	TANAH LAUT	Harapan II
6	RT. 19 RW.04	TEGAL REJO	KOTABARU	Harapan III

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIM Linmas, Dimana di aplikasi tersebut sudah disediakan untuk laporan anggota satlinmas, serta bisa melaporkan kejadian dan upaya penanggulangan yang terjadi di masing-masing daerah.
- Perlu dukungan kontinyu dalam hal penganggaran terhadap Satlinmas yang mana tahun sebelumnya Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan mendukung dalam hal Keamanan dan Keteritiban Umum, dalam hal ini melaksanakan Lomba Pos Kamling se Kal. Sel.
- Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan point di atas tidak dapat dilaksanakan, yang seharusnya bisa dilaksanakan dikarenakan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan linear terhadap kegiatan yang ada di OPD Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
- Keterbatasan Sumber Daya. Terkadang, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Linmas. Ini dapat mempengaruhi pelatihan dan pemeliharaan personel Linmas.
- Ketidapahaman Masyarakat, Jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat Linmas, hal ini dapat menjadi

hambatan. Edukasi dan sosialisasi yang kurang memadai dapat menyulitkan penerimaan dan partisipasi masyarakat.

- Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kelompok satlinmas perlu berjalan dengan baik. Jika ada masalah koordinasi atau komunikasi yang buruk, hal ini dapat menghambat efektivitas Linmas.
- Ketidaksetaraan Antar Wilayah. ada perbedaan kondisi antar wilayah di suatu provinsi. Wilayah yang lebih terpencil atau terisolasi mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan Linmas.
- Konflik Internal atau Eksternal, Adanya konflik internal di masyarakat atau konflik eksternal dengan kelompok atau komunitas tertentu dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Linmas.
- Tingkat Partisipasi yang Rendah, Jika tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Linmas rendah, hal ini dapat mengurangi efektivitasnya. Faktor-faktor seperti ketidakpercayaan atau kurangnya minat masyarakat dapat menjadi hambatan.
- Faktor Alam dan Lingkungan, Faktor-faktor alam seperti bencana alam atau kondisi lingkungan yang sulit dapat menjadi hambatan bagi kegiatan Linmas.
- Perubahan kondisi setelah tahun 2023 dapat mempengaruhi dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Linmas dan Satlinmas di Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Sangat Strategis dalam Upaya Menumbuh kembangkan Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah Yang Sangat Berdampak Signifikan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Penunjang Suksesnya Pelaksanaan otonomi Daerah.

- Terjalannya Koordinasi antara Satpol PP Darah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Selatan dengan Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan.
- Peningkatan Sumber Daya, Peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia dapat menjadi faktor penunjang utama. Dengan dukungan finansial yang memadai, Linmas dan Satlinmas dapat melaksanakan pelatihan, peralatan, dan kegiatan operasional dengan lebih efektif.
- Partisipasi Masyarakat yang Tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program Linmas dapat meningkatkan efektivitasnya. Edukasi masyarakat tentang peran Linmas dan satlinmas dan manfaatnya dapat membantu menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih baik.
- Pelatihan yang Berkualitas, Penyediaan pelatihan yang baik untuk aparaturnya linmas dan satlinmas dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan tersebut dapat mencakup pengetahuan tentang keamanan, penanganan bencana, dan keterampilan komunikasi.
- Koordinasi yang Efektif, Kerjasama yang baik antara Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel, Linmas, Satlinmas, dan berbagai pihak terkait lainnya seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat penting. Koordinasi yang efektif dapat memastikan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan Linmas.
- Teknologi dan Inovasi, Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Linmas. Misalnya, pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi untuk memudahkan pelaporan dan koordinasi (SIM Linmas).
- Peran Pemerintah Daerah, Dukungan kuat dari pemerintah daerah, termasuk kebijakan yang mendukung dan pengawasan yang efektif, dapat menjadi faktor penunjang kinerja Linmas Satpol PP dan Damkar Prov. Kalimantan Selatan.
- Ketahanan Terhadap Bencana, Mengingat Kalimantan Selatan dapat menghadapi risiko bencana alam seperti banjir atau kebakaran hutan,

upaya dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui peran Linmas dan Satlinmas dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi.

3.3.2 Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi

Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi

Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan responsibilitas terhadap penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bahaya kebakaran dan bencana	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100 %
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	73 unit	73 unit	100 %
Rata-Rata Capaian					100 %

Perbandingan kinerja tersebut dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %

	Kabupaten/Kota					
3	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 Unit	73 Unit	73 Unit	100 %
Rata-Rata Capaian						100 %

Penjelasan mengenai isi tabel di atas adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

- Target untuk Kinerja Utama jumlah dokumen informasi daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target yang sudah ditetapkan, sehingga presentasi capaian pada tahun 2024 sebesar 100 %.
- Target untuk Kinerja Utama Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebanyak 1 laporan dari target yang sudah ditetapkan, sehingga presentasi capaian pada tahun 2024 sebesar 100 %.
- Target untuk Kinerja Utama Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebanyak 73 Unit dari target yang sudah ditetapkan, sehingga presentasi capaian pada tahun 2024 sebesar 100 %.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. jumlah dokumen informasi daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal

Realisasi kinerja pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 dokumen.

- b. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 adalah 1 Laporan, pencapaian indikator kinerja yang terealisasi sebesar 100 % dari

target yang sudah ditetapkan, sama dengan tahun 2023 dimana realisasi sebesar 100 % dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan kejadian kebakaran pemukiman selama tahun 2024 intensitas kejadian tidak sebanyak pada tahun sebelumnya dan curah hujan yang banyak.

- c. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait untuk tahun 2024 sebanyak 73 Unit ada peningkatan dari tahun 2023 yang hanya 5 unit saja. Dimana diharapkan tiap Kabupaten/kota selalu tanggap dalam menghadapi bahaya kebakaran baik dari sarana prasarana maupun aparatur beserta relawan ditiap daerah.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya yang telah dilakukan :

- a. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan SPM kebencanaan
- b. Telah didukung dengan sarana dan prasarana unit kebakaran
- c. Pembentukan anggota piket/posko 24 jam dengan pembagian 3 shift.
- d. Dalam hal pelaporan kejadian kebakaran sudah disosialisasikan ke Kabupaten/kota agar menggunakan format satu data sehingga ada kesamaan pelaporan data sehingga memudahkan dalam pengintegrasian data kejadian kebakaran se Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja :

- a. Perlunya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana kebakaran yang dilaksanakan oleh OPD Satpol PP & Damkar secara bertahap dalam tahun ini.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana non kebakaran untuk penyelamatan seperti mobil rescue dan peralatan pendukung lainnya.
- c. Infrastruktur yang belum memadai atau kurang mendukung/perlu pembaharuan terhadap peralatan Damkar sesuai standar yang diberlakukan.

3.3 Rencana tidak lanjut :

- a. Peningkatan alokasi anggaran APBD/penambahan unit pemadam kebakaran yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.
- b. Adanya inovasi baru penyebarluasan informasi melalui teknologi/aplikasi yang membantu meningkatkan dalam hal pelaporan kejadian kebakaran yang memudahkan mendapat informasi data kebakaran.
- c. Akan melaksanakan rapat koordinasi rutin triwulanan dengan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah :

- Penambahan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
- Peningkatan SDM anggota Damkar yang terlatih setelah mengikuti Bimtek/pelatihan Pemadam Kebakaran.
- Penambahan personel anggota Damkar yang baru

4.1 Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Pol PP dan Damkar) Prov Kalsel	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Aparatur Pol PP dan Damkar Yang Bersertifikat	100%	100%	100%	100%

2	Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Meningkatkan Klasifikasinya	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100 %

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

1. Dalam mencapai realisasi Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar di Tahun 2024, yang mana target Capaian ditetapkan sebesar 100% Pada Tahun 2024, Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar dapat Terlaksana 100%(dari Jumlah rata-rata realisasi capaian atas jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Yang Mendapatkan Pelatihan Teknis dan Fungsional; Capaian jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang Mengikuti Uji Kompetensi; capaian jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang difasilitasi Mengikuti Pengembangan SDM).
2. Dalam Mencapai realisasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2024, Target Capaian ditetapkan sebesar 100%. Pada Tahun 2024, Pencapaian Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur(Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlaksana 100% (dari Jumlah rata-rata realisasi capaian atas jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Lulus Kesamaptaan; dan Capaian Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus uji kompetensi).

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Persentase Aparatur Pol PP dan Damkar Yang Bersertifikat
Pencapaian atas realisasi peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar Pada Tahun 2024 dengan Persentase 100%.
Pada Tahun 2024 Satpol PP& Damkar Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Workshop / Pelatihan singkat Peningkatan Kapasitas Jabatan Administrator, Pengawas dan Fungsional serta Personil Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 JP.
- b. Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Meningkatkan Klasifikasinya

Pencapaian atas realisasi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 dengan persentase 100% Sejak Tahun 2021 capaian setiap Tahun dapat Terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan aturan teknis Peraturan Perundang-undangan, Perencanaan dan Kegiatan-Kegiatan Bidang Teknis Terkait.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan program kegiatan dengan yang direncanakan sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2024, disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya Yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar Pada tahun 2024 dan sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan:

- (i) Secara berkala melakukan koordinasi dengan bidang-bidang teknis selaku user dari SDM, guna memperoleh saran dan masukan atas rencana pengembangan kapasitas personil, baik itu yang telah dilaksanakan maupun direncanakan
- (ii) Melakukan evaluasi dan monitoring atas SDM yang Telah ditingkatkan Kapasitasnya
- (iii) Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan bidang teknis selaku user atas SDM yang telah ditingkatkan Kapasitasnya
- (iv) Merumuskan program dann kegiatan pengembangan/peningkatan kapasitas personil dengan berpedoman atas 3 poin yang telas disebutkan diatas.
- (v) Melakukan inovasi dan pengembangan kegiatan yang baru / belum pernah dilaksanakan sebelumnya

2. Hambatan dalam Pencapai Kinerja

2. Kurangnya jumlah personil yang berkualifikasi pendidikan minimal S1(Strata 1) Pada Satpol PP danDamkar Provinsi Kalimantan Selatan

Mengingat bahwa hampir semua jenis DIKLAT yang diselenggarakan oleh Kemendagri (Terkait Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Damkar) mengharuskan Berpendidikan minimal S1; bisa diberikan perhatian khusus terhadap OPD Satpol PP & Damkar dalam usulan Formasi yang diajukan.

3. Perlunya dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan pada Satpol PP dan Damkar Untuk Memenuhi Kualifikasi teknis Satpol PP dan Damkar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Alokasi peserta Pengembangan Kapasitas personil baik yang dilaksanakan oleh instansi Pembina (KEMENDAGRI) maupun yang dilaksanakan di daerah sangat terbatas..Sebagai contoh tidak terakomodirnya usulan mengikuti peserta Diklat Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejumlah 2 orang tidak dapat terealisasi
5. Rencana Tindak Lanjut
 1. Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas berdasarkan skala prioritas organisasi
 2. Melakukan koordinasi dan Konsolidasi dengan OPD Terkait dalam hal Mencari dukungan atas rencana peningkatan kapasitas personil pada Satpol PP dan Damkar
 3. Memaksimalkan Pemberdayaan SDM pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Sesuai Bidang Teknis (Selaku Pengguna/User SDM).

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Sasaran Strategis pada bidang pengembangan Kapasitas Personil Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan terkait erat dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub transkrip dan sasaran Strategis organisasi pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan.

Keberhasilan Atas Pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar dan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, Sangat Mempengaruhi atas

sasaran/kinerja utama Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum.

Hal ini terlihat dalam sebagian kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Personil melalui kegiatan DIKLAT investigasi / Intelejen dalam rangka mendukung dan memperkuat fungsi Deteksi Dini yang juga merupakan salah satu unsur kegiatan Pol PP.
 - b. Peningkatan Kapasitas Personil melalui pembentukan dan pengembangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Keberadaan JAFUNG POL merupakan amanah dari Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya JAFUNG POL PP, personil (SDM) terpilih dapat diangkat sebagai JAFUNG POL PP., untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SATPOL PP, membantu melaksanakan pekerjaan Struktural dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS di Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Pelantikan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja dilaksanakan secara bertahap untuk memenuhi formasi yang tersedia pada Sat Pol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan diupayakan tetap dilaksanakan walaupun pada tahun 2024 tidak dilaksanakan yang disebabkan tidak ada personil yang dilantik.
 - d. Peningkatan Kapasitas Personil melalui Pelatihan Beladiri dan Kesamaptan Personil. Dengan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kemampuan beladiri, seluruh personil memiliki bekal kemampuan beladiri dalam menyukseskan tugas dilapangan. Melalui kegiatan kesamaptan, kondisi fisik setiap personil dapat selalu terpelihara (sehat).
4. Peningkatan Mental spiritual personil Satpol PP dan Damkar dilaksanakan untuk melengkapi peningkatan Kapasitas personil, agar selain kapasitas secara akademis juga diharapkan personil mendapatkan wawasan dari segi spiritualnya.

3.4 Capaian Kinerja Esselon IV

3.4.1 Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Peningkatan pemenuhan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranr	Pelatihan Kemampuan Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel	135 orang	135 orang	100%
		Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov.Kalsel	100%	100%	100 %
		Memberikan Fasilitas Pengembangan SDM Satpol PP dan Damkar Kab/Kota	65 orang	65 orang	100 %
Rata-rata Capaian					100 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis	65 org	135 orang	100 orang	100%
2	Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel	4 org	100%	100%	100%
3	Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar	36 org	65 orang	65 orang	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis Tahun 2024 terealisasi sebanyak 135 orang dari target 135 orang sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar lebih 100%.

Pencapaian Indikator Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dari target 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar tahun 2024 terealisasi sebanyak 65 orang dari target 65 orang sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar yang lulus Pelatihan kemampuan Teknis

Jumlah Aparatur Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan pelatihan teknis dan fungsional telah mencapai target, dengan realisasi pencapaian 135 orang personil (100%).

Pencapaian realisasi dimaksud tentunya tidak lepas dari dukungan perencanaan dan penganggaran .

Pelatihan teknis dan fungsional pada Satpol. PP & Damkar yang telah dilaksanakan tidak lepas dari serta kolaborasi yang baik antar Bidang serta koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten / Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan dukungan personil dari bidang – bidang teknis terkait dan seksi kesamptaan (internal bidang) dalam mempersiapkan personil untuk mengikuti pelatihan teknis & Fungsional yang telah direncanakan.

b. Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel

Pencapaian realisasi Persentase kelulusan Uji Kompetensi Bagi Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel dengan persentase 100% dapat kita capai setiap tahun nya dengan berpedoman pada kegiatan dan program yang telah kita susun secara berkala dan terstruktur sesuai dengan

peraturan yang berlaku dengan koordinasi yang baik dengan semua instansi terkait.

- c. Jumlah Aparatur Satpol PP dan Damkar Kab/Kota yang terfasilitasi dalam Pengembangan SDM(Ket.orang/Pejabat pada Kab/Kota terkait penyelenggaraan SDM Satpol PP & Damkar 65 orang, dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan Kabupaten/Kota maka Satpol. PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasikan dengan BPSDM dalam mengikuti pengembangan peningkatan Sumber Daya Aparatur.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan dan penurunan kinerja merupakan hal yang biasa terjadi, tetapi harus disikapi secara cepat agar dapat diketahui faktor penyebab dan solusi yang diperlukan.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Upaya yang telah dilakukan

Dalam rangka meningkatkan kinerja bagi aparatur Satpol. PP & Damkar setiap tahun telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol. PP & Damkar. Peningkatan Kapasitas tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 71 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, serta ketentuan teknis lain yang terkait.

Diklat yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Diklat Dasar Fungsional Pol PP sebanyak 2 orang;
- Diklat Teknis melalui Diklat TOT Damkar (1 orang), Diklat Kepamong Prajaan (1 orang), Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda (2 orang)
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional serta Pelaksana (89 orang)
- Pelatihan Satpol PP dan Damkar diberikan kepada aparatur Pol PP Dan Damkar baik ASN maupun Non ASN kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- melalui kegiatan peningkatan kemampuan beladiri karate dilaksanakan rutin sebulan 3 x kegiatan ;
- kegiatan pembinaan kesamaptaaan / peningkatan mental, fisik dan disiplin personil Pol PP dan Damkar dilaksanakan rutin 1 x Kegiatan setiap bulan .
- Pembinaan Spiritual / rohani dilaksanakan 2 x kali pada Tahun Anggaran 2024
- Melaksanakan Uji Kompetensi bagi Sat Pol PP dan Damkar Prov Kal-Sel adalah dalam kontek tidak sebagai pelaksana tetapi lebih kepada peserta (mengikuti kegiatan untuk meningkatkan Kompetensi melalui Diklat/Bimtek) terkait dengan peningkatan Kapasitas Aparatur personil Pol PP, Linmas dan Damkar
- Memberikan Fasilitasi Pengembangan SDM kepada Sat Pol PP Kabupaten / Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan, contoh sebagai berikut
- Fasilitasi dalam pengusulan penambahan pejabat fungsional Pol PP, Sat Pol PP & Damkar Prov Kal-Sel melakukan verifikasi berkas dan memberikan rekomendasi apabila dinyatakan memenuhi syarat pada aplikasi SijafPol, pada tahun 2024 dilaksanakan Fasilitasi kepada Kabupaten Tabalong dan telah keluar Rekomendasi dari Kementerian PAN / RB Republik Indonesia.
- Fasilitasi Pengusulan Pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dan Karya Bhakti Satpol PP, telah releasasi pengusulan kepada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah laut dan Kabupaten Balangan yang telah diusulkan dan direkomendasikan kepada Menteri dalam Negeri RI.

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur yang handal, serta memonitoring untuk pembinaan pengembangan kapasitas personil serta jabatan fungsional POL. PP & Damkar di Kabupaten/Kota dengan mengikutkan Kabupaten/Kota dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang mana hasil koordinasi monitoring kabupaten/kota hampir kurang lebih 75 orang untuk peningkatan Jafung POL PP di Tahun 2024.

Sewlain hal tersebut diatas dalam rangka upaya perbaikan kegiatan terkait Pengembangan Kapasitas personil telahj dilaksanakan koordinasi yang lebih mendalam dengan Balai Pengembangan Kompetensi Pol PP dan Damkar seta Direktorat Pol PP dan Linmas KEMENDAGRI RI .

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Terbatasnya alokasi program kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas personil baik yang dilaksanakan oleh instansi Pembina maupun yang dilaksanakan di daerah.

Perubahan regulasi terkait dengan Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapsitas personil sebagai contoh tidak terlaksananya uji kompetensi satpol PP baik perpindahan jabatan dan alih jenjang yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Kurangnya personil yang berkualitas karena banyak personil yang ijasah terakhirnya hanya SMA saja, sedangkan dalam pelatihan, diklat yang dibutuhkan yang mempunyai ijasah paling rendah S1(Diklat PPNS, DIKLAT TOT, DIKLAT Kepamongprajaan, dll).

Kurangnya minat personil Satpol. PP & Damkar yang mau menduduki jabatan fungsional Pol. PP dan PPNS Pol. PP yang disebabkan oleh faktor-faktor internal (SDM yang bersangkutan) dan eksternal (konsekuensi-konsekuensi teknis).

c. Rencana tindak lanjut

Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan SDM Satpol. PP dan Kerjasama dalam hal teknis kegiatan peningkatan Kapasitas SDM.

Menyampaikan usulan kepada instansi Pembina agar alokasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas personil dapat ditingkatkan.

Menginventarisir Bimtek dan mengkoordinasikan kegiatan DIKLAT kepada instansi terkait sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan dalam rangka meningkatkan sumberdaya aparatur Satpol. PP & Damkar.

Untuk memaksimalkan pemberdayaan kerjasama Satpol. PP dan Damkar Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam melakukan tindakan penertiban

non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkara.

4. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja

1. Keberhasilan atas pencapaian kinerja didukung oleh Aparatur Satpol.PP dan Damkar yang berkompeten, sehingga berpengaruh dengan tercapainya sasaran strategis. Dalam hal ini selayaknya perlu memberikan Fasilitas dalam bentuk pembinaan dan peningkatan kapasitas personil untuk mewujudkan Satpol. PP yang handal.

2. Melaksanakan kegiatan inovasi / kegiatan baru terkait dengan peningkatan kapasitas personil sebagai bentuk adaptasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi yang semakin kompleks

Dalam peningkatan kapasitas personil melalui kegiatan diklat PPNS penegak Perda bertujuan untuk membentuk personil yang berkualifikasi penyidik, maka diharapkan penegakan Perda dapat dilaksanakan secara efektif.

3.4.2 Kepala Seksi Bina Kesamaptaaan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov.Kalsel	Pelatihan Kesamaptaaan Satpol PP dan Damkar	36 orang	36 orang	100%
		Pemeriksaan Jasmani Bagi Satpol PP dan Damkar	36 orang	36 orang	100%

NO.	INDIKATOR KINERJA	Realisasi	Realisasi Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus kesamptaan	36 org	36 org	36 org	100%
2.	Jumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damkar	36 org	36 org	36 org	100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Adapun realisasi Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus Kesamaptaaan pada tahun 2024 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang atau telah terlaksana 100%. Yang terakomodinir melalui kegiatan Pelatihan rutin kesamaptaaan dan Pelatihan Karate, Ghasuku dan Tes Kesamaptaaan.

Adapun realisasi Jumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damkar pada tahun 2023 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang atau telah terlaksana 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi Jumlah Sumber Daya Aparatur yang lulus kesamaptaaan pada tahun 2024 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang dengan capaian 100%
- b. Realisasi jJumlah Personil Yang Lulus standar jasmani Satpol PP & Damka pada tahun 2024 sejumlah 36 orang, dari target sejumlah 36 orang dengan capaian 100%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2024 penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol. PP & Damkar tidak menurun, bahkan cenderung meningkat. Kondisi fisik dan mental personil yang prima sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini, segala upaya dilakukan dengan melakukan pengembangan kapasitas personil, memberdayakan anggaran, dan sarpras minimal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

1. 1. Upaya – upaya yang dilakukan

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang – bidang teknis secara rutin dan berkala, untuk memperoleh saran dan masukan dalam rangka pemnbinaan kesamaptaaan personil Satpol PP dan Damkar.
- b. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung bina kesamaptaaan pada Satpol. PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Melakukan perencanaan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapsitas personil

1.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja

- a. Kegiatan yang telah diagendakan seringkali terbentur dengan kegiatan lain (tugas Pol. PP & Damkar), sehingga personil yang diberikan pelatihan terbatas jumlahnya/kurang efektif.
- b. Kurang tersedianya Tenaga instruktur / Narasumber yang berasal dari instansi lain yang berkompeten tentang Kepamongprajaan

1.3 Rencana tindak lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi kegiatan Bina Kesamaptaaan dengan bidang – bidang teknis
- b. Menyusun program dan kegiatan dengan skala prioritas guna peningkatan kemampuan kesamaptaaan Anggota Satpol. PP & Damkar.
- c. Mengirimkan Personil Internal untuk mengikuti DIKLAT TOT Polisi Pamong Praja

3. Analisa Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Bina Kesamaptaaan baik itu pembinaan fisik kesamaptaaan maupun pelatihan beladiri karate, dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik dan mental personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan bekal pengetahuan beladiri yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri personil ketika bertugas, sehingga hambatan dilapangan terkait dengan keamanan personil dapat terjaga tetapi tetap dilandasi dengan sikap yang humanis dan mengedepakan fungsi Perlindungan Masyarakat. Dengan suksesnya kegiatan Bina Kesamaptaaan, harapannya adalah dapat memberikan dukungan kepada Bidang Teknis dalam mencapai sasaran program kegiatannya secara maksimal.

Pelatihan kesamaptaaan dilaksanakan dengan kegiatan binsic, Pelatihan Peraturan baris-berbaris (PBB) bekerjasama dengan instansi TNI . Selain PBB juga diberikan dengan materi sikap, etika dan perilaku, sehingga personil Pol PP memiliki etika, kepribadian dan perilaku yang baik dalam menjaga hierarki yang berlaku pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan..

5.1 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Umum yang Berhasil Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan Mengenai Ketertiban Umum	Persentase Masyarakat/Aparatur yang Memahami Tentang Peraturan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase Permasalahan Trantibum Yang Berhasil Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Aparatur Yang Memahami Tentang Peraturan Trantibum	100%	100%	100%	100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

1.1. Pencapaian Indikator Persentase Permasalahan Trantibum Yang Berhasil ditindak Lanjuti Tahun 2024 adalah 100% dari Target 100%.

1.2. Pencapaian Indikator Persentase Aparatur Yang Memahami Tentang Peraturan Trantibum Tahun 2024 adalah 100% dari Target 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

2.1. Pencapaian atas realisasi permasalahan Trantibum yang berhasil ditindak lanjuti Satpol PP dan Damkar pada tahun 2024 dengan persentase 100%, sejak tahun 2021 capaian setiap tahun dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan perencanaan dan kegiatan bidang teknis terkait.

2.2. Pencapaian atas realisasi aparaturnya yang memahami tentang peraturan trantibum pada tahun 2024 dengan persentase 100%, sejak tahun 2021 capaian setiap tahun dapat terlaksana sepenuhnya 100% dengan dukungan aturan teknis Peraturan Perundang-undangan, perencanaan dan kegiatan-kegiatan pada bidang teknis terkait.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya yang Telah Dilakukan

- Dalam Pencapaian Kinerja Tersebut berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pelatihan teknis terkait kegiatan Pengamanan, pengawalan, Perencanaan Awal Setiap Sebelum Giat di Lapangan dan Evaluasi pada Semua Kegiatan Yang dilaksanakan agar segala Sesuatu nya bisa Sesuai Rencana Awal.
- Memaksimalkan Anggaran Yang Tersedia dengan Mengaitkan Kegiatan Yang Relevan dengan Kegiatan Yang Pokok.

b. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana dan prasarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan.
- Data Yang Kurang Proporsional dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Kegiatan Operasional gabungan tidak terealisasi contohnya dalam hal pengamanan VVIP (Presiden RI), yang mana didalam perencanaan dengan kekuatan baik personil maupun

anggaran yang telah disiapkan. Waktu dan kondisi mempengaruhi terhadap pelaksanaan dilapangan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Untuk Kedepannya dalam setiap pelaksanaan kegiatan diupayakan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.
- Melakukan Koordinasi internal agar porsi anggaran dalam mendukung kegiatan dapat terakomodir sehingga capaian kinerja dapat lebih meningkat.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

5. Pada Setiap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tersebut diatas tidak terlepas dari segala dukungan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, Baik dalam bentuk pelatihan Teknis di Lapangan Bagi Seluruh anggota Operasional Maupun Bantuan dalam Bentuk Dukungan teknis Sarana Operasional dalam Pelaksanaan Tugas Dilapangan Bagi Anggota.

3.5. Capaian Kinerja Esselon IV

3.5.1 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase permasalahan trantibum yang berhasil ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%
No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024		
		2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	13 Kab/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%

	Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				
2	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	6 Objek	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	0 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Tahun 2024 terealisasi sejumlah 12 Laporan dari target 12 Laporan sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Tahun 2024 terealisasi sebanyak 12 Laporan dari target 12 Laporan sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pencapaian Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia Tahun 2024 terealisasi sebanyak 6 Unit dari target 6 Unit sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

Pada Tahun 2024 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan sebanyak 12 laporan yang mana laporan ini adalah laporan hasil kegiatan Kamtramtibusmtranmasy serta pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan baik itu kegiatan penertiban dan koordinasi dengan kab/kota maupun kegiatan pengamanan Pilkada tahun 2024, dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mana target kinerjanya adalah Jumlah Wilayah yang dilaksanakan Patroli.

- b. Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pada Tahun 2024 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang mana output dari kegiatan ini yaitu laporan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa di Provinsi Kalimantan Selatan. Dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah Objek Vital dan Pejabat yang diamankan sama dengan tahun sebelumnya.

- c. Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia

Pada Tahun 2024 ada Sebanyak 6 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Mendukung Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Kinerja Tersebut berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pelatihan teknis terkait kegiatan Pengamanan, Perencanaan Awal Setiap Sebelum Giat di Lapangan dan Evaluasi pada Semua Kegiatan Yang dilaksanakan agar segala Sesuatunya bisa Sesuai Rencana Awal

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan

e. Rencana tindak lanjut

Untuk Kedepannya dalam setiap pelaksanaan kegiatan diupayakan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pada Setiap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tersebut diatas tidak terlepas dari segala dukungan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Baik dalam bentuk pelatihan Teknis di Lapangan Bagi Seluruh Anggota Operasional Maupun Bantuan dalam Bentuk Dukungan Teknis Sarana Operasional dalam Pelaksanaan Tugas Dilapangan Bagi Anggota.

3.5.2 Kepala Seksi Kerja Sama

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat/Aparatur dan Lembaga/Organisasi Terhadap Peraturan mengenai Ketertiban Umum	Memfasiltasi Permasalahan Trantibum	100%	100 %	100%
Rata-rata Capaian					100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2023		
		2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Permasalahan Trantibum yang Di Tindaklanjuti	13 kab/kota	100%	100%	100 %
Rata-rata Capaian					100%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Persentase Permasalahan Trantibum yang di tindaklanjuti Tahun 2023 terealisasi sebanyak 100% dari target 100% sehingga persentase capaian pada tahun 2024 sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

a. Persentase Permasalahan Trantibum yang Di Tindaklanjuti

Realisasi Kinerja maksimal target & indikator sebesar 100%. Hal ini disebabkan pada sebagian permasalahan yang difasilitasi pada tahun 2023 dilakukan lagi fasilitasi di tahun 2024, sebagai contoh adalah penegakkan permasalahan Tibum dan Tranmasy lintas Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan maupun dibatas wilayah Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan.

Permasalahan yang difasilitasi pada Tahun 2024 adalah :

1. Fasilitasi dalam bentuk Tim Kerjasama yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/043/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.
2. Serta Memfasilitasi kegiatan kesiapsiagaan Sat Pol PP pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada SUB Kegiatan pada Seksi Kerjasama yaitu Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan dengan mengaitkan pada kegiatan lain yang relevan dengan kegiatan pokok, sebagai contoh adalah dengan sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan yang sama dikoordinasi secara struktur pada bidang Tibum dan Transmasy Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.

Memaksimalkan Anggaran Yang Tersedia dengan Mengaitkan Kegiatan Yang Relevan dengan Kegiatan Pokok.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang menjadi penyebab dalam pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

Faktor dari eksternal kondisi transibum dan transmasy yang relatif kondusif sehingga tidak memerlukan fasilitasi – fasilitasi dalam penanganannya. Data Yang Kurang Proporsional dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Kegiatan Tidak Terealisasi dengan maksimal.

c. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut adalah dengan melakukan koordinasi dan evaluasi internal serta Menyusun rencana kegiatan yang dikoordinasikan Bersama, sehingga sinkronisasi kegiatan benar – benar terwujud yang bermuara pada capaian kinerja lebih meningkat sehingga porsi anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal dengan tetap mengedapankan prinsip, efektif, efisien dan akuntabel.

5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

a. Pengembangan Program Kegiatan Yang relevan.

Pengembangan Program yang relevan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mapping kegiatan ditubuh Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan. Pada prinsipnya seksi Kerjasama siap mengakomodir

kegiatan dan pengembangan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan uraian tugas pada seksi Kerjasama.

b. Dukungan dari Bidang-bidang teknis yang lain.

Dukungan dari bidang teknis lainnya sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan maupun capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Kasi Kerjasama. Selain dari bidang teknis juga diperlukan dukungan dan Kerjasama dari Satpol. PP Kab/Kota dan Lembaga lainnya dalam hal koordinasi dan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

c. Dukungan Satpol PP dan Kab/Kota dan Instansi Terkait Lainnya dalam koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal..

B. Akuntabilitas Keuangan**1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024**

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.701.632.500	13.194.675.846	95,14
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.347.000	20.937.500	93,69
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.030.500	14.143.000	94,10
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.316.500	6.794.500	92,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.436.955.500	11.057.234.635	96,68
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.273.755.500	10.897.634.635	96,66
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.200.000	159.600.000	97,79
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.380.000	149.682.500	95,72
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.380.000	149.682.500	95,72
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.914.000	698.316.831	96,60
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.202.000	54.240.850	96,51
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.880.000	20.768.000	94,92
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	9.480.000	99,79
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.332.000	613.827.981	96,62
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	770.612.000	698.107.500	90,59
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.622.000	310.700.000	85,92
07.05.	Pengadaan Mebel	68.340.000	56.830.000	83,16
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.650.000	330.577.500	97,04

8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.150.000	262.748.500	97,26
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.100.000	43.250.000	93,82
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.050.000	219.498.500	97,97
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.274.000	307.648.380	95,46
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.894.000	273.564.280	95,02
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.380.000	34.084.100	99,14
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.703.082.885	19.579.177.315	78,40
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.741.514.685	18.966.917.911	96,08
01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	361.388.100	345.056.030	95,48
01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	983.835.000	940.146.200	95,56
01.14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	149.999.900	139.103.351	92,74
01.15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.000.000	37.748.100	62,91
01.16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000.000.000	922.936.410	92,29
01.17	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	16.056.049.700	15.577.810.188	97,02

01.18	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.008.183.585	883.171.932	87,60
01.19	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	122.058.400	120.945.700	99,09
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	851.568.200	527.354.407	61,93
02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	124.999.900	108.327.584	86,66
02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	300.000.000	187.114.200	62,37
02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	331.568.000	190.219.923	57,37
02.06	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.300	12.110.500	80,74
02.09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	80.000.000	29.582.200	36,98
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	110.000.000	84.904.997	77,19
03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	110.000.000	84.904.997	77,19
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.752.786.800	6.329.111.209	93,73
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	6.752.786.800	6.329.111.209	93,73
01.22	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	648.470.000	568.101.192	87,61
01.23	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	3.049.036.800	2.758.658.375	90,48
01.27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.055.280.000	3.002.351.642	98,27
T O T A L		41.157.502.185	39.102.964.370	95,01

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp 41.157.502.185** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.102.964.370** atau sebesar **95.01 %** dan realisasi fisik **100%**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Total alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 13.701.632.500

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp. 13.194.675.846 atau sebesar 95.14%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:*
Alokasi Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 15.030.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.143.000 atau sebesar 94.10% dan realisasi fisik 100%.
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
Alokasi Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 7.316.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.794.500 atau sebesar 92.87% dan realisasi fisik 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 11.273.755.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.897.634.635 atau sebesar 96,66% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 163.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.600.000 atau sebesar 97,79% dengan realisasi fisik 100%*

c. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 156.380.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.682.500 atau sebesar 95,72% dengan realisasi fisik 100%.*

d. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 56.202.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.240.850 atau sebesar 96,51% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 21.880.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.768.000 atau sebesar 94,92% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.480.000 atau sebesar 99,79% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 635.332.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 613.827.981 atau sebesar 96,62% dengan realisasi fisik 100%.*

e. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :*

- *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 361.622.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 310.700.000 atau sebesar 85,92% dengan realisasi fisik 100%.*

- *Pengadaan Mebel alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 68.340.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.830.000 atau sebesar 83,16% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 340.650.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 330.577.500 atau sebesar 97,04% dengan realisasi fisik 100%.*

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 46.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.250.000 atau sebesar 93,82% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 224.050.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.498.500 atau sebesar 97,97% dengan realisasi fisik 100%.*

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 287.894.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 273.564.280 atau sebesar 95,02% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 34.380.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.084.100 atau sebesar 99,14% dengan realisasi fisik 100%.*

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Total alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 20.703.082.885

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp. 19.579.177.315 atau sebesar 78.40%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

a. *Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :*

- *Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 361.388.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.056.030 atau sebesar 95,48% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 983.835.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 940.146.200 atau sebesar 95,56% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 149.999.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.103.351 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.748.100 atau sebesar 62,91% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 922.936.410 atau sebesar 92,29% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan*

alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 16.056.049.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.577.810.188 atau sebesar 97,02% dengan realisasi fisik 100%.

- *Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.008.183.585 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 883.171.932 atau sebesar 87,60% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 122.058.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.945.700 atau sebesar 99,09% dengan realisasi fisik 100%.*

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :

- *Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 124.999.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.327.584 atau sebesar 86,66% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.114.200 atau sebesar 62,37% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 331.568.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 190.219.923 atau sebesar 57,37% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp.15.000.300*

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.110.500 atau sebesar 80,74%

- *Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.582.200 atau sebesar 36,98% dengan realisasi fisik 100%.*

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :

- *Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.904.997 atau sebesar 77,19% dengan realisasi fisik 100%.*

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Total alokasi anggaran untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 6.752.786.800

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp. 6.329.111.209 atau sebesar 93,73%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :

- *Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 648.470.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 568.101.192 atau sebesar 87,61% dengan realisasi fisik 100%.*
- *Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 3.049.036.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.758.658.375 atau sebesar 90,48% dengan realisasi fisik 100%.*

- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 3.055.280.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.002.351.642 atau sebesar 98.27% dengan realisasi fisik 100%.*

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

NO	2023		2024	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan: - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan: - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan ; - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan ; - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub kegiatan :	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub kegiatan :
		- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
		- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
		- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
		- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
		- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
		- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketertiban Umum
		- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sub kegiatan :		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sub kegiatan :
		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 		<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
		- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Total		Total
	3 Program	11 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan	3 Program	11 Kegiatan, 33 Sub Kegiatan
		Total Anggaran		Total Anggaran
		Rp. 34.012.365.655		Rp. 41.157.502.185

N0	2023		2024	
	Belanja Operasi	Jumlah	Belanja Operasi	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 8.923.330.390	Belanja Pegawai	Rp. 11.437.635.500
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 22.385.781.265	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.525.059.685
	Belanja Hibah	-	Belanja Hibah	-
	Belanja Modal		Belanja Modal	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.703.254.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 4.194.807.700
	Total	Rp. 31.204.862.543	Total	Rp. Rp. 41.157.502.185

Total Alokasi anggaran 2024 sebesar **Rp. 41.157.502.185** dengan peruntukkan Belanja Pegawai **Rp. 11.437.635.500** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 2.514.305.110** atau sebesar 28,18%, ,Belanja Barang dan Jasa **Rp. 25.525.059.685** mengalami kenaikan sebesar **Rp.3.139.278.420** atau sebesar 14,02%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp.4.194.807.700** mengalami kenaikan sebesar **Rp.1.491.553.700** atau sebesar 55,18%.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja yaitu 100% dengan kategori sangat memuaskan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Eselon II, dengan 1 (satu) Sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100% kategori memuaskan.
2. Eselon III, dengan 3 (tiga) Sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100% kategori memuaskan.
3. Eselon IV, dengan 11 (sebelas) Sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama dengan capaian kinerja 100% kategori memuaskan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain dengan menyusun serta mengefektifkan pohon kinerja sebagai landasan dalam penyusunan dokumen kinerja untuk mencapai sinkronisasi antar jenjang/level pada dokumen kinerja, sehingga seluruh entitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mampu memahami serta menetapkan indikator kinerjanya secara berjenjang.

A. Strategi Peningkatan Kinerja

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ini adalah Laporan Evaluasi Kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Laporan ini mencakup Laporan Evaluasi Kinerja Program, Laporan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan dan Evaluasi Keuangan. Dengan laporan ini diharapkan dapat memperjelas atau memberikan gambaran sampai sejauh mana program yang tertuang dalam Renstra telah dilaksanakan. Adapun Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data dan pelaporan secara berkala, selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu/perPPTK/Perbidang terhadap pertanggungjawaban kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan serta meningkatkan kualitas revidasi atas laporan kinerja.
2. Melaksanakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tentang sistem akuntabilitas kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan dokumen kinerja.
3. Menggambarkan dokumentasi/kegiatan Pelayanan Publik program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menggunakan website yang kami Kelola (www.satpolppdamkar.provkalsel.go.id)

Diharapkan dengan adanya laporan kinerja ini akan dapat memacu peningkatan kinerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROV. KALSEL**



Drs. H. Zakly Asswan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 198602 1 005

Lampiran Foto Kegiatan Tahun 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG PPHD





BIDANG LINMAS DAMKAR



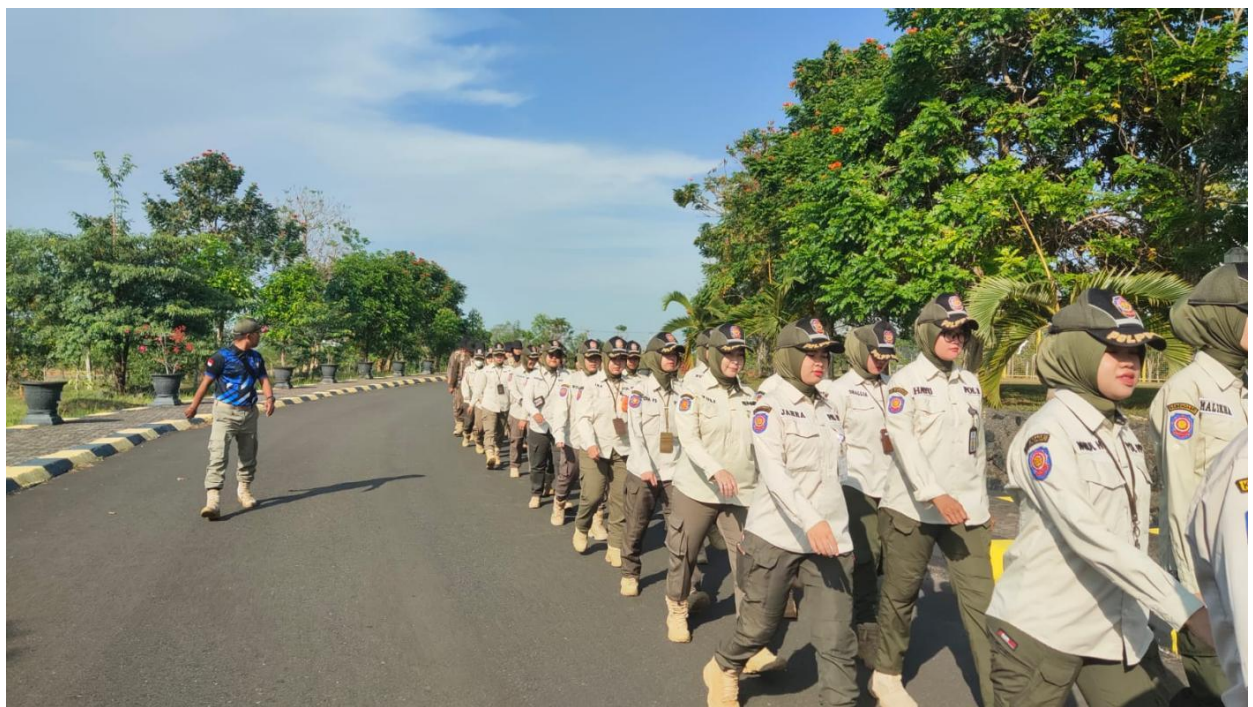






BIDANG TIBUM







BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS











PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Dharma Praja No.1 Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 4770001 Fax : (0511) 4770019 Email : satpolpp--provkalsel.pphd@gmail.com
BANJARBARU



REKAPITULASI DATA PENEGAK/PPNS
DILINGKUNGAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN SEKALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN I,II,III, & IV TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH			KONDISI/JLH				PELAKSANAAN KASUS													Non Yustisi (Pembinaan)	PROSES YUSTISI					WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PENEGAKAN
									PROSES PENYELESAIAN KASUS														LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DLM PROSES (BELUM P-21/ SP-3)	
		KM2	KEC	KEL/DESA	PPNS	PERDA	PERKADA	KASUS	BULAN																			
									J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J J U N	J J U L	A G U S	S E P	O K T	N O V	D E S								
0	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	38.164,28 Km ²	153	144/1864	4	367	1158	38	2	2	1	8	6	7	5	1	1	1	1	3	38							
1	KOTA BANJARMASIN	98,46 Km ²	5	52/	10			2271	190	161	435	278	168	196	174	109	146	120	153	141	2127			144				
2	KAB.BARITO KUALA	2,496,46 Km ²	17	6/195	3	5	3	60	3	5	8	2	4	1	4	1	1	5	23	3	60							
3	KAB.TABALONG	3,766,97 Km ²	12	6/195	9	106	328	151	10	10	17	10	12	13	27	33	19				151							
4	KAB.TANAH LAUT	3,631,35 Km ²	11	5/130	5	1	1	125	13	14	13	36	8	17	6	4	3	2	2	7	124			1				
5	KAB.KOTABARU	9,382,72 Km ²	22	214	4	150	822	9	4	1	2	0	1	0	0	0	0	1			9							
6	KAB.TANAH BUMBU	5,006,96 Km ²	10	4/144	10	3		76	3	8	5	6	3	28	4	9	10				70				6			
7	KAB.HULU SUNGAI SELATAN	1,804,94 Km ²	11	8/161	5	13	2	24	12	8	4										23				1			
8	KAB.HULU SUNGAI TENGAH	1,472,00 Km ²	11	169	2	19	9	127	14	6	22	4	6	8	13	11	9	8	4	22	127							
9	KAB.HULU SUNGAI UTARA	892,70 Km ²	10	5/214	2	10	5	44	2	4	5	2	5	4	4	4	2	4	4	4	44							
10	KAB.BALANGAN	1,878,30 Km ²	8	157	4	227	712	29	2	5	4	2	2	1	5	3	2	0	2	1	24	5	5	5				
11	KAB.BANJAR	4,688,06 Km ²	20	13/277	1	48	0	66	3	5	10	3	4	2	6	7	7	8	4	7	66							
12	KOTA BANJARBARU	371,00 Km ²	5	5/144	8	12	3	72	5	6	9	7	14	7	11	9	4				52			2	20			
13	KAB.TAPIN	2,700,82 Km ²	12	4/198	0	176	364	43	0	4	6	5	1	9	5	3	2	2	2	4	43							
JUMLAH		38.164,28 Km ²	153	281/3983	67	1137	3407	3135	263	239	541	363	234	293	264	194	206	151	195	192	2958	5	7	170	7	0		

NOTE: HARUS MENGISI WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PENEGAKAN DISHEET PENJELASAN

Banjarbaru, Desember 2024

KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MUHAMMAD DIAN ANSYARI, SH. MH
NIP. 19860619 200903 1 002

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM
NIP. 19650909 198602 1 005

KEPALA SEKSI
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

HENDRA KUSUMAWARDHANA, S.Kom
NIP. 19880811 201001 1 002

LAMPIRAN CSF

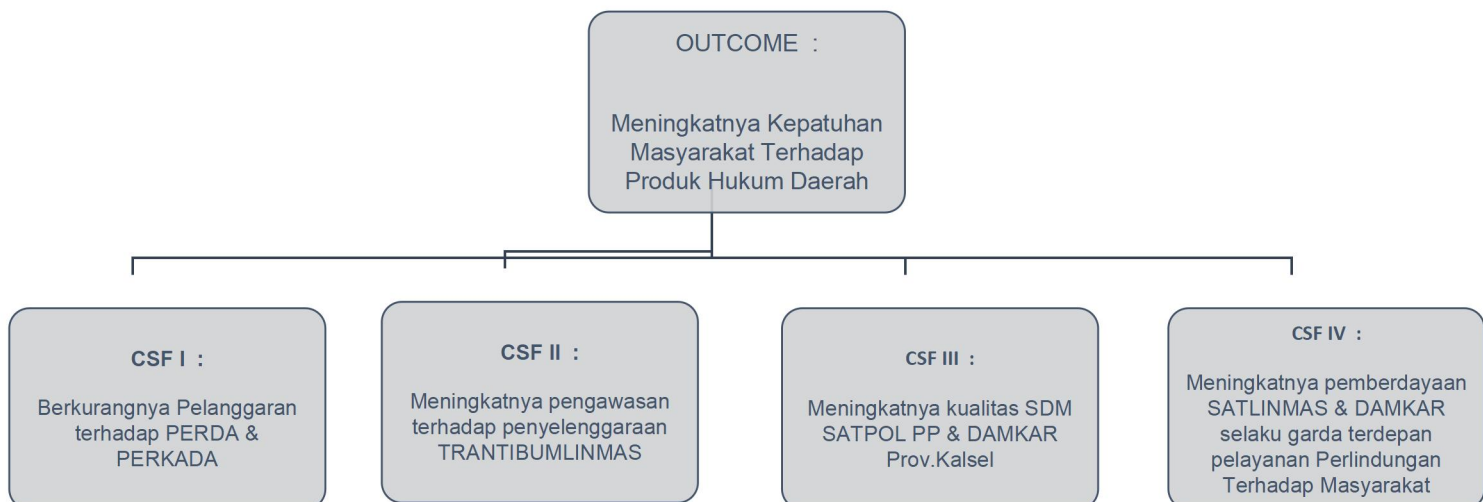
CSF

RENDAHNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Masih Terjadi Pelanggaran terhadap PERDA & PERKADA	Berkurangnya Pelanggaran terhadap PERDA & PERKADA
Kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS	Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS
Masih rendahnya kualitas SDM SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel	Meningkatnya kualitas SDM SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel
Masih kurangnya pemberdayaan SATLINMAS & DAMKAR selaku garda terdepan pelayanan Perlindungan Terhadap Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan SATLINMAS & DAMKAR selaku garda terdepan pelayanan Perlindungan Terhadap Masyarakat

CSF PADA OUTCOME

MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH



**KONDISI YANG DIPERLUKAN AGAR CSF MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT
TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH DAPAT TERWUJUD**

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Berkurangnya Pelanggaran terhadap PERDA & PERKADA	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Penindakan terhadap pelanggaran PERDA & PERKADA b. Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap Pelaksanaan PERDA & PERKADA c. Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDA & PERKADA di Kabupaten/Kota
Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Patroli Wilayah rawan Gangguan pelanggaran TRANTIBUMLINMAS b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS c. Melakukan kerjasama dalam Pengawasan Wilayah maupun penyelenggaraan cipta kondisi TRANTIBUMLINMAS dengan Instansi maupun stakeholder terkait
Meningkatnya kualitas SDM SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan /memfasilitasi pelatihan kepada personil SATPOL PP & DAMKAR dalam rangka Peningkatan Kapasitas b. Melakukan pembinaan terhadap fisik kesamaptaan serta pembinaan Mental dan kerohanian kepada personil c. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas personil PPNS dalam penegakan PERDA & PERKADA
Meningkatnya pemberdayaan SATLINMAS & DAMKAR selaku garda terdepan pelayanan Perlindungan Terhadap Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan Anggota SATLINMAS b. Melakukan fasilitasi pembinaan Aparatur SATLINMAS Kabupaten/Kota c. Melakukan fasilitasi pembinaan aparaturnya DAMKAR Kabupaten/Kota d. Penyediaan Peta rawan bencana kebakaran

POHON KINERJA
MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK
IK : Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah
IK : Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah

Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparat terhadap produk hukum
IK : Persentase masyarakat dan aparat yang memahami dan mematuhi tentang produk hukum daerah

Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Ketertiban Umum
IK : Persentase permasalahan ketertiban umum yang berhasil dihindari

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur (Satpol PP, Linmas dan Damkar) Prov Kal Sel
IK : Persentase anggota Satpol PP dan Damkar yang meningkat keahliannya

Meningkat Peran Satfimas dan Damkar
IK : Persentase Satfimas dan Damkar Kab/Kota yang Aktif Dalam Penanganan Ketertiban umum, Bahaya Kebakaran dan Bencana

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
IK : Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda
IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Perda

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP
IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP

Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Massa
IK : Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
IK : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum
IK : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum

Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada
IK : Jumlah Permasalahan/Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Ditulisi/Mediasi

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kerjasama dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penelitian oleh PPNS Penegak Perda, Pelaksanaan Sidang di Tempat Operasional Sekretariat PPNS
IK : Jumlah Permasalahan/Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Peraturan Gubernur yang Ditulisi/Mediasi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. (0511) 4770001 Fax : (0511) 4770019 Email: Satpolppdamkar@kalselprov.go.id

BANJARBARU

REKAPITULASI DATA ANGGOTA SATLINMAS KABUPATEN/KOTA
SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SK BUPATI/ WALIKOTA	JUMLAH SATLINMAS	SUDAH MENDAPATKAN PELATIHAN	KET.
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Kota Banjarmasin	5	52	SK Kasat Pol PP No. 41 Tahun 2024	294	318	SK Kepala Satpol PP
2.	Kota Banjarbaru	5	20	SK Walikota No 188.45/426/KUM/2024 dan SK Walikota No. 188.45/427/KUM/2024	140	30	
3.	Kab. Batola	17	201	SK BUPATI No. 188.45/320/KUM/2023 16 Agustus 2023	1.950	540	
4.	Kab. Banjar	20	290	SK BUPATI No. 188.45/210/KUM/2024	2.969	30	
5.	Kab. Tapin	12	135	SK BUPATI No. 100.3.3.2/171/KUM/2024	2.570	210	
6.	Kab. Hulu Sungai Selatan	11	148	SK BUPATI No. 100.3.3.2/307/KUM/2023 27 Desember 2023	648	30	
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	11	169	SK Bupati No. 300/209/300/TAHUN 2024	845		
8.	Kab. Hulu Sungai Utara	10	219	SK BUPATI No. 188.45/479/KUM/2022	1.229	30	
9.	Kab. Balangan	8	157	SK BUPATI No. 188.45/189/Kum Tahun 2018	2.338	30	
10.	Kab. Tabalong	12	131		1.440	30	
11.	Kab. Tanah Laut	11	135	SK BUPATI No. 024/Pol.PP/2015 Tgl 25 Agt 2015	130		
12.	Kab. Tanah Bumbu	12	157	SK BUPATI No. 188.46/36/POLPP- DAMKAR/2023 Tgl 02 Januari 2023	3.938	238	
13.	Kab. Kotabaru	22	202		1.026		
JUMLAH		156	2.016		19.517	1.486	

KABID LINMAS & DAMKAR,

H. MAULANNA FATAHILLAH, S.STP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820519 200012 1 003

Mengetahui
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

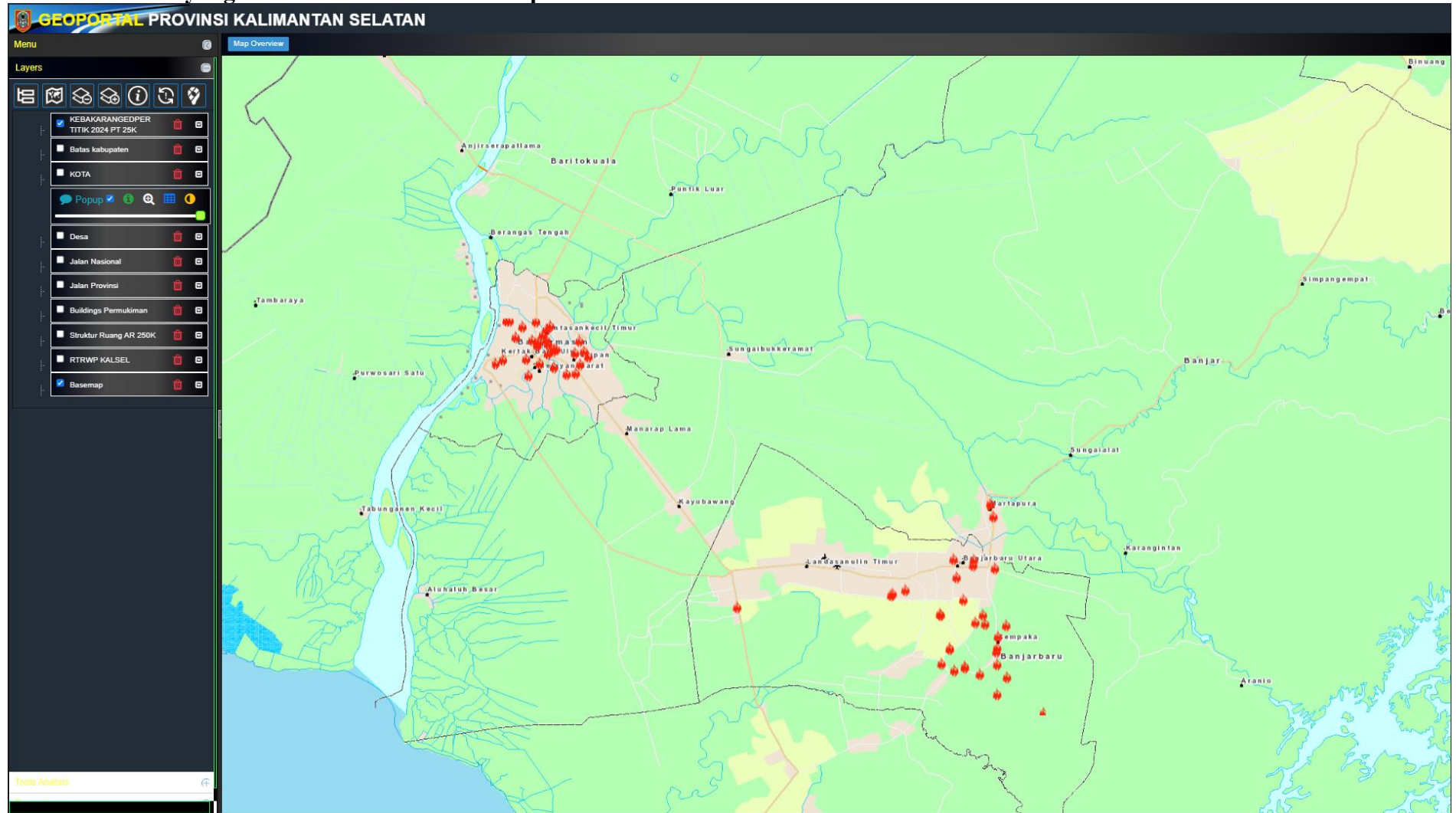
Pembina Utama Madya
NIP. 19650909 198602 1 005

PPTK Sub Kegiatan,

MUHAMMAD MAULANA RAHMAN, S.STP

Penata (III/c)
NIP. 19950831 201808 1 001

1. Titik kebakaran yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP & Damkar Prov. Kalsel





3. Titik Gangguan Trantibumlinmas yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP & Damkar Prov. Kalsel

